**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menjadi kewenangannya, melalui program kerja yang dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan yang tepat. Sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri 86 Tahun 2016 bahwa Perangkat Daerahmenyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah memiliki peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Walikota terpilih, yang dirumuskan melalui proses yang yang bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD, melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, top down dan bottom up. Renstra Perangkat Daerah disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah
2. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan rancangan akhir dan
6. Penetapan

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dimaksud. Penyusunaan Renstra BPKD mencakup analisis gambaraan pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indicator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, perumusan strategis dan arah kebijakan Perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja perangkat daerah dan rumusan rencana program, kegiatan, indicator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarakan strategi dan kebijakan BPKD.

* 1. **LANDASAN HUKUM**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah (Rencana Pembangunan JangkaPanjangNasionalTahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. PeraturanPemerintahNomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata cara Perencanaan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 TentangRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 47 Seri D19);
	1. **MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja Strategis (Renstra)Badan Pengelola Keuangan Daerah dirumuskan dengan maksud Untukmenyediakandokumen yangdapatdijadikan arahdanpedoman bagi Perangkat daerahdalammewujudkanketerpaduan dan kebersamaan dalampenyelenggarantugaspemerintahandibidang Pengelolaankeuanganselamajangka waktu 5tahun.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah

* 1. **SISTEMATIKA PENULISAN**

Renstra Badan Pengelola Keuangan DaerahKota Padang Panjang tahun 2019-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| **BAB I** | **PENDAHULUAN**Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. |
| **BAB II**  | **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**Menjabarkan tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.  |
| **BAB III**  | **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi, misi dan program Walikota terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan RT RW dan KLH, penentuan isu-isu strategis. |
| **BAB IV**  | **TUJUAN DAN SASARAN**Memuat tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. |
| **BAB V** | **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**Memuat Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah |
| **BAB VI** | **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**Keterkaitan Antara Kelompok Sasaran, Program dan Kegiatan BPKDKota Padang Panjang 2019-2023 |
| **BAB VII** | **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2023 |
| **BAB VIII** | **PENUTUP** |

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAAERAH**

* 1. **Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang melaksanakan pelayanan dengan struktur organisasi seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Selain itu, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjangmelaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;dan
4. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang Pendapatan, terdiri dari:

1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
2. Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan; dan
3. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.

d. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, terdiri dari:

1. Sub Bidang Anggaran dan Data Informasi Keuangan;
2. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
3. SubBidang Perbendaharaan.

e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:

1. Sub Bidang Verifikasi;
2. Sub Bidang Pelaporan; dan
3. Sub Bidang Akuntansi.

f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari:

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan;
2. Sub BidangPenatausahaan; dan
3. Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penghapusan.
4. UPTD; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah, setiap unit yang berada dalam struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah memiliki tupoksi sebagai berikut :

**2.1.a. Kepala BPKD,** mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kepala Badan mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah;
2. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah;
4. pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasansesuai tugas dan fungsinya

**2.1.b. Sekretariat,**dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPKD.

Sekretaris mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
2. pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
3. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Subbag dilingkungan sekretariat memiliki tugas pokok dan fungsi :

* 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana serta kehumasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
4. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
5. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
6. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang dikepalai oleh Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

* 1. penatausahaan keuangan;
	2. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
	3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**2.1.c. Bidang Pendapatan**,yang dikepalai oleh Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidang Pendapatan yang meliputi pendataan dan pendaftaran, penetapan dan pembukuan serta penagihan dan keberatan.

Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pendataan dan pendaftaran;
2. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang penetapan dan pembukuan;
3. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang penagihan dan keberatan; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang pada Bidang Pendapatan memiliki fungsi sebagai berikut :

* 1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran yang dikepalai oleh Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas menyelenggarakan program pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.

Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai fungsi:

* 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pendataan dan pendaftaran;
	2. pengelolaan urusanpendataan dan pendaftaran meliputi daftar induk wajib pajak, wajib retribusi dan PBB-P2;
	3. pembinaan dan pengendalian pengelolaan pendapatan asli daerah; dan
	4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
	5. Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan yang dikepalai oleh Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan mempunyai tugas menyelenggarakan program penetapan dan pembukuan.

Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penetapan dan pembukuan;
2. pengelolaan urusanpenetapan dan pembukuan meliputi Wajib Pajak daerah dan memberi kartu pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah [NPWPD]; dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
	1. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan yang dikepalai oleh Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas menyelenggarakan program penagihan dan keberatan pajak dan retribusi.

Sub Bidang Penagihan dan keberatan mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penagihan dan keberatan;
2. pengelolaan urusanpenyetoran pajak; dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.d **Bidang Anggaran dan Perbendaharaan**, yang dikepalai oleh Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidang Anggaran yang meliputi penyusunan dan pengendalian anggaran, data dan informasi keuangan daerah, pengelolaan kas daerah dan perbendaharaan.

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyusunan dan pengendalian anggaran;
2. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program data dan informasi keuangan daerah;
3. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan kas daerah;
4. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perbendaharaan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang pada Bidang Anggaran dan Perbendaharaan memiliki fungsi sebagai berikut :

* 1. Sub Bidang Anggaran dan Data Informasi Keuangan yang dikepalai oleh Kepala Sub Bidang Anggaran dan Data Informasi Keuanganmempunyai tugas menyelenggarakan program penyusunan anggaran meliputi dokumen rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan pengelolaan data informasi daerah.

Sub Bidang Anggarandan Data Informasi Keuangan mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang anggaran dan data informasi keuangan;
2. pengelolaan urusansistem penyusunan dan pengendalian anggaran serta data informasi daerah; dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
	1. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah yang dikepalai oleh Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerahmempunyai tugas menyelenggarakan program pengelolaan kas daerah.

Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerahmempunyai fungsi:

* + - 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan kas daerah;
			2. pelaksanaan dan penyelenggaraan program pengelolaan kas daerah; dan
			3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
	1. Sub Bidang Perbendaharaan yang dikepalai oleh Kepala Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas dalam menyelenggarakan program perbendaharaan.

Sub BidangPerbendaharaan mempunyai fungsi:

* 1. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Perbendaharaan;
	2. pengelola realisasi penerimaan dan pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
	3. penyelenggaraan kebijakan teknis untuk penataanusahaan keuangan; dan
	4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

2.1.e **Bidang Akuntansi dan Pelaporan**,yang dikepalai oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidangAkuntansiyang meliputi akuntansi, verifikasi dan pelaporan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

* + - * 1. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang akuntansi;
				2. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang verifikasi;
				3. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pelaporan; dan
				4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan memiliki fungsi sebagai berikut

1. Sub Bidang Verifikasi yang dikepalai oleh Kepala Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas menyelenggarakan program verifikasi keuangan daerah atas pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Sub Bidang Verifikasi mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program verifikasi;
2. pelaksanaan verifikasi laporan keuangan pertanggungjawaban perangkat daerah; dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Sub Bidang Pelaporan yang dikepalai oleh Kepala Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program pelaporan keuangan daerah atas pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Sub Bidang Pelaporan mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pelaporan keuangan; dan
2. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Sub Bidang Akuntansi yang dikepalai oleh Kepala Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas menyelenggarakan program akuntasi keuangan daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Sub Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Akuntansi;
2. penyelenggaraan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.f **Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah**, yang dikepalai oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidang aset daerah yang meliputi penatausahaan, pengawasan, pengendalian, penghapusan, perencanaan dan pemanfaatan aset.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perencanaan dan pemanfaatanbarang milik daerah;
2. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengawasan, pengendalian dan penghapusanbarang milik daerah;
3. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penatausahaan barang milik daerah; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang pada Bidang Barang Milik Daerah memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan yang dikepalai oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan mempunyai tugas menyelenggarakan program perencanaan dan pemanfaatan asetbarang milik daerah.

Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
2. pengelolaan urusanperencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah;dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Sub Bidang Penatausahaan yang dikepalai oleh Kepala Sub Bidang Penatausahaan mempunyai tugas menyelenggarakan program penatausahaan barang milik daerah.

Sub Bidang Penatausahaan mempunyai fungsi:

* 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penatausahaan aset;
	2. Pengelola urusanpenatausahaan aset meliputi penerimaan, penyimpanan dan penyaluran dan penggunaan aset; dan
	3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
1. Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penghapusan yang dikepalai oleh Kepala mempunyai tugas menyelenggarakan program pengawasan, pengendalian dan penghapusan barang milik daerah.

Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penghapusan mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengawasan, pengendalian dan penghapusanbarang milik daerah;
2. pengelola urusanpengawasan, pengendalian dan penghapusanbarang milik daerah; dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun Stuktur Organisasi BPKD Kota Padang Panjang adalah sebagaimana tergambar pada gambar berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI

Kepala

Jabatan Fungsional Tertentu

Subid Pengawasan Pengendalian dan Penghapusan

Subid Penatausahaan

Subid Perencanaan dan Pemanfaatan

Subid Akuntansi

Subid Pelaporan

Subid Verifikasi

Subid Perbendaharaan

Subid Pengelolaan Kas

Subid Penagihan dan Keberatan

Subid Anggaran dan Informasi Keuangan

Subid Penetapan dan Pembukuan

Subid Pendataan dan Pendaftara

Bidang Pengelolaan Barang Milik daerah

Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kasubang Keuangan Perencanaan Evaliasi dan Pelaporan

Bidang Pendapatan

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Sekretaris

* 1. **Sumber Daya OPD**
		1. Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang didukung oleh kekuatan pegawai sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Jumlah Pegawai menurut Latar Belakang Pendidikan**

**Pada BPKD Kota Padang Panjang Keadaan Desember 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gol** | **SD** | **SLTP** | **SLTA** | **D.I** | **D.II** | **D.III** | **S.I** | **S.II** | **S.III** | **Tot** |
|  | **L** | **P** | **L** | **P** | **L** | **P** | **L** | **P** | **L** | **P** | **L** | **P** | **L** | **P** | **L** | **P** | **L** | **P** |  |
| IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 |  | - | - | 5 |
| III | - | - | - | - | 3 | 7 | - | - | - | - | 2 | 6 | 7 | 11 |  | 1 | - | - | 37 |
| II | - | - | 2 | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| THL | - | - | - | 1 | 10 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 16 |
| Jmlh | - | - | 2 | 1 | 22 | 10 | - | - | - | - | 3 | 7 | 12 | 12 | - | 2 | - | - | 71 |

**Tabel 2.2**

**Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional**

**Pada BPKD Kota Padang Panjang Keadaan Desember 2018**

**(Tidak Termasuk Tenaga Harian Lepas)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jabatan Struktural / Fungsional** | **Jumlah** | **Total** |
| **Laki-laki** | **Perempuan** |
| 1 | Eselon II.b | 1 | - | 1 |
| 2 | Eselon III.a | 1 | - | 1 |
| 3 | Eselon III.b | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Eselon IV.a | 3 | 7 | 10 |
| 5 | Eselon IV.b | - | - | - |
| 6 | Fungsional | - | - | - |
|  | Jumlah | 8 | 10 | 18 |

2.2.2 Perlengkapan

Peralatan dan Perlengkapan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**

**Aset yang Dikuasi**

**BPKD Kota Padang Panjang Keadaan Desember 2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Aset** | **Jumlah Aset** | **Nilai Aset** | **Kondisi** |
|  |  |  |  | **B** | **RR/KB** | **RB** |
| **1.** | **Tanah** | **5** | **10.085.215.000,-** |  |  |  |
| **2.** | **Peralatan dan Mesin** | **562** | **9.172.610.649,-** |  |  |  |
|  | Alat Besar | 1 | 410.042.568,- | 1 |  |  |
|  | Alat-alat Angkutan | 87 | 4.751.905.048,- | 73 | 10 | 4 |
|  | Alat Ukur | 3 | 52.750.000,- | 3 |  |  |
|  | Alat Kantor dan Rumah Tangga | 334 | 3.577.425.433,- | 294 | 20 | 20 |
|  | Alat studio dan Komunikasi | 27 | 332.912.600,- | 22 | 3 | 2 |
|  | Alat Laboratorium | 1 | 47.575.000,- |  | 1 |  |
| **3.** | **Bangunan dan Gedung** | **14** | **9.838.417.743,-** |  |  |  |
|  | Bangunan Gedung  | 5 | 9.570.590.743,- | 4 | 1 |  |
|  | Monumen | 8 | 267.827.000,- | 5 |  | 3 |
| **4.** | **Jalan, Irigasi dan Jaringan** | **1** | **2.216.100,-** |  |  |  |
|  | Instalasi | 1 | 2.216.100,- | 1 |  |  |
| **5.** | **Aset Tetap lainnya** | **43** | **14.314.950,-** |  |  |  |
|  | Buku Perpustakaan | 43 | 14.314.950,- |  | 43 |  |
|  | **Total** | **624** | **29.112.774.442,-** |  |  |  |

* 1. **Kinerja Pelayanan SKPD**

Kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerahmerupakan hal mutlak yang harus menjadi perhatian dalam rangka menciptakan disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pengelolaan keuangan daerah, baik pendapatan maupun belanja, sehingga proses pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban dan harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisiensi, ekonomis dalam upaya mewujudkan fungsi dari APBD itu sendiri yang meliputi:

1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintahdaerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Untuk mewujudkan Fungsi-fungsi tersebut, maka dalam penyusunan anggaran terdapat beberapa prinsip disiplin yang harus dilaksanakan mencakup, antara lain:

1. Perencanaan Pembangunan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD
3. Pelaksanaan Anggaran, dimana semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Salah satu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, karena peraturan tersebut secara langsung akan menentukan format pengelolaannya dalam artian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

* + 1. **Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah sejalan dengan berkembangnya tuntutan kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang frekuensinya senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini tentu harus disikapi dengan penyediaan dana yang memadai.

Secara umum Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dengan kata lain Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Secara umum komponen Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.Setiap kelompok pendapatan diatas, kemudian dirinci lagi kedalam masing-masing jenis pendapatan sebagai berikut:

1. Untuk PAD, jenisnya meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
2. Dana Perimbangan, jenisnya meliputi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus;
3. Untuk lain-lain pendapatan yang sah, antara lain Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemda Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemda Lainnya
4. **Realisasi Pendapatan Daerah**

Dilihat dari komponen Pendapatan Daerah, maka dapat dikatakan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang menjadi hak daerah dalam satu tahun anggaran, yang akan menjadi penerimaan kas daerah. Secara umum Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang terus menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, demikian juga untuk periode tahun 2013-2018. Secara keseluruhan total rencana Pendapatan Daerah tahun 2013–2018 adalah Rp.**2.564.729.108.780,06** dengan realisasi sebesar Rp.**2.675.225.929.496,36** (98,98%). Gambaran target dan realisasi pendapatan pada APBD tahun anggaran 2014-2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel.2.4**

**Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang**

**Periode 2014–2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **Realisasi** | **%Kenaikan** |
| 1 | 2014 | 475.280.788.657,33 |  |
| 2 | 2015 | 505.170.035.889,81 | 6,28% |
| 3 | 2016 | 549.929.864.023,02 | 8,86% |
| 4 | 2017 | 591.062.889.679,67 | 7,47% |
| 5 | 2018 | 553.782.351.221,53 | -6,3% |

 *Sumber :Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDTahun Anggaran 2013-2018*

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjangsecara nominal cenderung meningkatdari tahun 2014 hingga tahun 2017 namun pada tahun 2018 mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, Dengan rata-rata pertmbuhan 4,7 persen. Pertumbuhan terbesar adalah pada tahun 2016 persen dan terendah pada tahun 2018 sebesar -6,3% persen.

1). Pendapatan Asli Daerah

Selanjutnya disampaikan gambaran perkembangan PAD Kota Padang Panjang periode tahun 2014-2018 yang secara keseluruhan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun.Secara keseluruhan total rencana Pendapatan Asli Daerah selama periode tahun 2014-2018mengalami kenaikan sebesar adalah Rp 28.150.986.331. Secara rata-rata selama periode tersebut, PAD mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12,73 persen. Pertumbuhan terbesar pada tahun 2015 yaitu sebesar 29,9 persen dan terkecil (-) 10,2%. Pada tahun 2018. Pertumbuhan yang minus tahun 2018 disebabkan oleh :

* 1. Dikeluarkannya penerimaan Dana Bos sebesar 7,5 Milyar dari komponen PAD
	2. Penurunan Deviden Bank nagari sebesar 2 milyar

Adapun rincian rencana dan realisasi PAD Kota Padang Panjang tahun 2014-2018, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel. 2.5**

**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang**

**Periode 2014–2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun**  | **Realisasi** | **% Kenaikan** |
| 1 | 2014 | 51.601.386.498,33 |  |
| 2 | 2015 | 67.035.654.310,81 | 29,91% |
| 3 | 2016 | 70.350.628.266,02 | 4,94% |
| 4 | 2017 | 88.837.033.624,67 | 26,27% |
| 5 | 2018 | 79.752.372.829,53 | -10,22% |

*Sumber :Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013-2018*

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah yang dirinci sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel .2.6**

**Realisasi Hasil Pajak Daerah Kota Padang Panjang**

**Periode 2014–2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun**  | **Realisasi** | **% Kenaikan** |
| 1 | 2014 | 5.388.058.175,00 |  |
| 2 | 2015 | 5.556.826.451,00 | 3,13% |
| 3 | 2016 | 6.134.371.477,00 | 10,39% |
| 4 | 2017 | 6.906.484.263,00 | 12,58% |
| 5 | 2018 | 8.293.992.612,00 | 20,08% |

*Sumber :Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013-2018*

Dari sisi realisasi terlihat bahwa selama periode tersebut, pencapaian pajak daerah setiap tahunnya terjadi naik turun, namun secararata-rata Pajak Daerah dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar yaitu 11,55 %.Secara keseluruhan total rencana Pajak Daerah periode tahun 2014-2018 adalah Rp.31.403.731.714,00 dengan realisasi sebesar Rp.32.279.732.978,00,- (102,78%).

Demikian juga dengan retribusi daerah, selama periode tahun 2014–2018 pencapaian retribusi daerah menunjukkan peningkatan positif dan negatif namun secara penerimaaan dari sektor retribusi Kota Padang Panjang terealisasi sebesar Rp.23.473.097.717,69 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.24.430.872.000,00 atau sebesar (96,07%) sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel .2.7**

**Realisasi Hasil Retribusi Daerah**

**Kota Padang Panjang**

**Periode 2014–2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun**  | **Realisasi** | **% Kenaikan** |
| 1 | 2014 | 4.602.131.527,34 |  |
| 2 | 2015 | 4.488.801.379,68 | -2,46% |
| 3 | 2016 | 5.088.861.331,05 | 13,00% |
| 4 | 2017 | 4.134.303.831,39 | -18,75% |
| 5 | 2018 | 5.158.999.649,90 | 24,78% |

*Sumber :Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TahunAnggaran 2013-2018*

Jika dilihat dari komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yangdipisahkan yang diperoleh dari perusahaan daerah, BUMD dan bagi hasil dana revolving serta lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah yang diperoleh dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan dari pengembalian serta kontribusi pihak ketiga secara keseluruhan pencapaiannya masih dibawah 100 persen, hal ini disebabkan karena hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah sangat tergantung dari pihak lain seperti BUMD dan kontribusi pihak ketiga, untuk lebih jelasnya perkembangan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta Lain-lain PAD yang sah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel . 2.8**

**Realisasi Hasil Pengelolaan**

**Kekayaan Daerah yang dipisahkan**

**Kota Padang PanjangPeriode 2014–2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun**  | **Realisasi** | **% Kenaikan** |
| 1 | 2014 | 4.453.824.848,00 |  |
| 2 | 2015 | 5.760.138.840,00 | 29,33% |
| 3 | 2016 | 5.067.982.880,00 | -12,01% |
| 4 | 2017 | 7.693.432.872,00 | 51,80% |
| 5 | 2018 | 5.795.081.205,00 | -24,67% |

*Sumber :Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013-2018*

**Tabel .2.9**

**Realisasi Lain-lain PAD yang sah Kota Padang Panjang**

**Periode 2014-2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun**  | **Realisasi** | **% Kenaikan** |
| 2 | 2014 | 37.157.371.947,99 |  |
| 3 | 2015 | 51.229.887.640,13 | 37,87% |
| 4 | 2016 | 54.059.412.577,97 | 5,52% |
| 5 | 2017 | 70.102.812.658,28 | 29,67% |
| 6 | 2018 | 60.504.299.362,63 | -13,69% |

*Sumber :Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013-2018*

Dari tabel komponen Lain-lain PAD yang sah diatas, terlihat ada peningkatan pada setiap tahunnya. Dari total rencana selama 5 tahun terakhir sebesar Rp.**252.955.797.965,00** dapat direalisasikan sebesar Rp.**273.053.784.184,67**(107,94%). Dengan rata-rata pertumbuhan sebesar Rp. 14,84%.

2). Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain seperti Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan tranfer Pemerintah Daerah lainnya, Bantuan Keuangan Provinsi. Sebagian besar Pendapatan Daerah memang berasal dari Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Pendapatan Transfer dari Dana Perimbangan secara total rencana Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang selama periode tahun 2014-2018 adalah sebesar Rp.**2.169.002.777.024,-** dengan realisasi Rp.**2.103.284.605.061,-**(96,97%). Adapun rincian rencana dan realisasi dari penerimaan yang berasal dari dana perimbangan tahun 2014 - 2018 seperti terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel . 2.10**

**Realisasi Pendapatan Dari Dana Perimbangan**

**Kota Padang Panjang Periode 2014-2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun**  | **Realisasi** | **% Kenaikan** |
| 1 | 2014 | 378.738.216.086,00 |  |
| 2 | 2015 | 381.194.551.009,00 | 0,64% |
| 3 | 2016 | 461.720.096.046,00 | 21,12% |
| 4 | 2017 | 439.519.041.267,00 | -4,80% |
| 5 | 2018 | 442.112.700.653,00 | 0,59% |

*Sumber :Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013-2018*

Dari tabel diatas terlihat pendapatan dari dana perimbangam mengalami kenaikan tambah (+) dan kurang (-) dengan rata-rata pertumbungan sebesar 4,39% hal ini sangat tergantung dari kebijakan pemerintah terhadap keuangan daerah.

Selanjutnya dari komponen Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat lainnya, dari rata-rata total rencana sebesar Rp.118.704.282.000,00,-terealisasi Rp.114.704.282.000,00 (96,63%), tahun 2016 Kota Padang Panjang tidak memperoleh pendapatan yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat Lainnya. sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel .2.11**

**Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**

**Kota Padang Panjang Periode 2014-2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun**  | **Realisasi** | **% Kenaikan** |
| 1 | 2014 | 30.186.585.000,00 |  |
| 2 | 2015 | 37.681.329.000,00 | 24,82% |
| 3 | 2016 | - | - |
| 4 | 2017 | 42.836.368.000,00 | - |
| 5 | 2018 | 4.000.000.000,00 | - 90,66% |

*Sumber :Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013-2018*

Selanjutnya pada rekening Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi rata-rata pendapatan Kota Padang Panjang selama 5 tahun terakhir yang direncanakan sebesar Rp.70.427.903.194,- terealisasi sebesar Rp.76.960.585.733,- (109,27%). Penerimaan dari jenis pendapatan ini terlihat adanya peningkatan pada setiap tahunnya sebagaimana terlihat dari tabel dibawa ini :

**Tabel . 2.12**

**Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi**

**Kota Padang Panjang Periode 2014-2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun**  | **Realisasi** | **% Kenaikan** |
| 1 | 2014 | - | - |
| 2 | 2015 | 19.258.501.570,00 | - |
| 3 | 2016 | 17.759.139.711,00 | -7,78% |
| 4 | 2017 | 19.470.446.788,00 | 9,63% |
| 5 | 2018 | 20.472.497.664,00 | 5,14% |

*Sumber :Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013-2018*

**Tabel . 2.14**

**Realisasi Pendapatan Dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

**Kota Padang Panjang Periode 2014-2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun**  | **Realisasi** | **% Kenaikan** |
| 1 | 2014 | 14.754.601.073,00 | - |
| 2 | 2015 | - | - |
| 3 | 2016 | 54.059.141.577,97 | - |
| 4 | 2017 | 62.706.814.788,00 | 15,99% |
| 5 | 2018 | 7.444.780.075,00 | -88,12% |

*Sumber :Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013-2018*

Rekening Pendapatan Daerah yang terakhir adalah berasal dari Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah, dari 5 tahun terakhir pendapatan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dilihat dari rata-rata pendapatan sector ini telah menyumbang sebesar Rp.138.965.337.513,97,- (104,49%) dari Rencana sebesar Rp.132.988.875.316,00,-.

1. **Pengelolaan Belanja Daerah**

Secara konseptual Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, klasifikasi Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Secara garis besar Belanja Daerah dapat dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa seiring dengan kecenderungan peningkatan Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang dari tahun ke tahun, maka juga diikuti adanya kecenderungan peningkatan pada struktur belanja daerah. Kecenderungan peningkatan ini tentunya sejalan pula dengan perkembangan program, kegiatan dan kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan serta memperhatikan kondisi umum pendapatan daerah, maka dilakukan beberapa kebijakan umum dalam pengelolaan Belanja Daerah tahun 2013 - 2018 yang muaranya diarahkan untuk memenuhi rencana anggaran belanja untuk seluruh bagian belanja pada setiap fungsi bidang kewenangan sebagaimana telah dialokasikan dalam APBD tahun anggaran 2013-2018

Berdasarkan pengelompokkan belanja daerah, secara garis besar dapat dikelompokkan atas belanja tidak langsung dan belanja langsung.

* **Belanja Tidak Langsung**, terdiri dari :
* Belanja Pegawai
* Belanja Bunga
* Belanja Subsidi
* Belanja Hibah
* Belanja Bantuan Sosial
* Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
* Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
* Belanja Tidak Terduga.
* **Belanja Langsung**, terdiri dari :
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal.

Disamping itu dalam penyusunan belanja daerah tahun 2013- 2018 tetap mengacu kepada prinsip- prinsip umum penyusunan APBD antara lain mendorong terciptanya APBD yang semakin sehat, menjamin dipertahankannya kesinambungan anggaran, mengutamakan peningkatan kemampuan penyediaan sumber anggaran dari PAD.

**Realisasi Belanja**

Secara keseluruhan total rencana Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017 adalah Rp.3.111.635.121.683,56 dengan realisasi sebesar Rp.2.447.726.706.195,76(78,66%). Adapun gambaran umum perkembangan rencana dan realisasi Belanja Daerah Kota Padang Panjang periode Tahun Anggaran 2013-2018 seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.14**

**Rencana dan Realisasi Belanja Daerah**

**Kota Padang Panjang**

**Periode 2014-2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun**  | **Realisasi** | **% Kenaikan** |
| 1 | 2014 | 406.617.041.960,00 |  |
| 2 | 2015 | 491.459.794.814,00 | 20,86% |
| 3 | 2016 | 548.357.928.458,41 | 11,57% |
| 4 | 2017 | 607.630.104.037,99 | 10,89% |
| 5 | 2018 | 612.982.009.674,00 | 0,88% |

*Sumber :Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013-2018*

Secara umum pengelolaan Anggaran Belanja Daerah dari Tahun 2014 - 2018, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan tetap mengacu kepada prinsip-prinsip umum pengelolaan anggaran antara lain prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Selanjutnya disampaikan bahwa walaupun adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam Anggaran Belanja Daerah selama Tahun 2014-2018, namun secara umum dalam pengalokasian dan penggunaannya masih tetap berdasarkan Pendekatan Anggaran Kinerja (berorientasi pada hasil) dengan tujuan untuk meningkatkan Akuntabilitas Perencanaan Anggaran serta mempertegas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran yang didukung pula dengan Standar Satuan Harga. Disamping itu kita tetap komit, bahwa dalam pengelolaan Anggaran Tahun 2013- 2017 tetap memperhatikan prinsip - prinsip penyusunan APBD seperti :

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.

2. Disiplin Anggaran.

3. Keadilan Anggaran.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

1. **Pengelolaan Pembiayaan Daerah**

Secara umum Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk dan atau berfungsi menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Padang Panjang dari tahun 2013-2018 pada dasarnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan umumnya digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang.

Adapun gambaran target dan realisasi dari Pembiayaan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018, baik itu aspek Penerimaan maupun aspek Pengeluaran Pembiayaan Daerah seperti terdapat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.15**

**Rencana dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Padang Panjang**

**Periode 2013–2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun**  | **Penerimaan Pembiayaan** | **Pengeluaran Pembiayaan** |
| **Rencana** | **Realisasi** | **%** | **Rencana** | **Realisasi** | **%** |
| 1 | 2013 | 67.577.692.601,17 | 67.577.692.601,17 | 100,00 | 10.007.000.000,00 | 10.007.000.000,00 | 100,00 |
| 2 | 2014 | 81.402.082.735,64 | 81.402.082.735,64 | 100,00 | 15.000.000.000,00 | - | 0,00 |
| 3 | 2015 | 150.065.829.432,97 | 150.065.829.432,97 | 100,00 | 16.800.000.000,00 | 15.800.000.000,00 | 94,05 |
| 4 | 2016 | 147.976.070.508,78 | 147.976.070.508,78 | 100,00 | 3.400.000.000,00 | 3.400.000.000,00 | 100,00 |
| 5 | 2017 | 145.651.337.624,39 | 145.651.337.624,39 | 100,00 | - | - | - |
| 6 | 2018 | 128.606.014.888,07 | 128.606.014.888,07 | 100,00 | - | - | - |
| **JUMLAH** | **519,411,012,902.95**  | **519,411,012,902.95**  |  **100.00**  |  **45,207,000,000.00**  |  **29,207,000,000.00**  |  **64.61**  |

*Sumber :Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013-2018*

Dalam kontek organisasi pemerintah, akuntabilitas kinerja merupakan satu hal yang mutlak diperlukan sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban atas segala aktivitas yang telah dilaksanakan. Secara umum Kinerja Pelayanan OPD mengungkapkan segala bentuk aktivitas dan kegiataan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik.

Dalam Kinerja Pelayanan BPKD Kota Padang Panjang baik dari sisi kinerja maupun realisasi anggaran terhadap anggaran yang direncanakan, telah sesuai dengan target yang ditetapkan . hal ini tergambar pada tabel 2.16 dan 2.17 dibawah ini :

|  |
| --- |
| **TABEL 2.16.a** |
| **Pencapaian Kinerja Pelayanan Sesuai Tugas dan Fungsi BPKD** |
| **Kota Padang Panjang** |
| **NO** | **Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD** | **Target SPM** | **Target IKK** | **Target Indikator Lainnya** | **Target Renstra OPD Tahun ke-** | **Realisasi Capaian tahun ke-** | **Rasio Capaian pada Tahun ke-** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2014** | **2015** | **2016** | **2014** | **2015** | **2016** |
| ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | ( 5 ) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | ( 9 ) | ( 10 ) | ( 11 ) | ( 12 ) | ( 13 ) | ( 14 ) |
| 1. | Meningkatnya pemahaman SDM tentang Pengelolaan keuangan daerah |   |   |   | 229 orang | 219 orang | - | 229 orang | 138 orang | - | 100% | 63,01% | - |
| 2. | Jumlah peraturan/prosedur pengelolaan keuangan daerah |   |   |   | 6 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | 6 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Amprah gaji PNS di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang |   |   |   | 27 SKPD ( 76 amprah / bulan ) 100 % | 27 SKPD ( 76 amprah / bulan ) 100 % | 27 SKPD ( 988 amprah / tahun ) 100 % | 27 SKPD ( 76 amprah / bulan ) 100 % | 27 SKPD ( 76 amprah / bulan ) 100 % | 27 SKPD ( 988 amprah / tahun ) 100 % | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang berbasis aplikasi dalam penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan, pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan daerah |   |   |   | 27 SKPD ( 100 % ) | 27 SKPD ( 100 % ) | 27 SKPD ( 100 % ) | 27 SKPD ( 100 % ) | 27 SKPD ( 100 % ) | 27 SKPD ( 100 % ) | 100% | 100% | 100% |
| 5. | Penerapan Inpres No.1 tahun 2013 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di bidang penganggaran |   |   |   | 100% |  ( 4 dokumen ) 100 % |  ( 4 dokumen ) 100 % | 100% |  ( 4 dokumen ) 100 % |  ( 4 dokumen ) 100 % | 100% | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD** | **Target SPM** | **Target IKK** | **Target Indikator Lainnya** | **Target Renstra OPD Tahun ke-** | **Realisasi Capaian tahun ke-** | **Rasio Capaian pada Tahun ke-** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2014** | **2015** | **2016** | **2014** | **2015** | **2016** |
| ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | ( 5 ) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | ( 9 ) | ( 10 ) | ( 11 ) | ( 12 ) | ( 13 ) | ( 14 ) |
| 6. | Tersedianya data kajian investasi daerah |   |   |   | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | - | 1 Dokumen | 0 Dokumen | - | 100% | 0% |
| 7. | Tersusunya laporan penatausahaan keuangan daerah tepat waktu |   |   |   | 4 dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% | 100% | 100% |
| 8. | Tersedianya data keuangan daerah |   |   |   | 4 dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% | 100% | 100% |
| 9. | Tersusunya laporan rekonsiliasi data keuangan daerah |   |   |   | 4 dokumen | - | - | 4 dokumen | - | - | 100% | - | - |
| 10. | Terwujudnya sistem akuntabilitas keuangan daerah yang diyakini kewajarannya |   |   |   | 2 dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% | 100% | 100% |
| 11. | Meningkatnya pendapatan daerah dengan terdatanya sumber-sumber pendapatan daerah |   |   |   | 46.724.333.148 | 53.068.561.858,50 | 67,24 M | 51,5 M | 67,154 M | 70,34 M | 110,27 % | 126,54 % | 104,62 % |
| 12. | Tercapainya target PBB-P2 |   |   |   | 900.000.000 | 1.039.739.000,00 | 1 M | 813,5 jt | 821,4 jt | 772,22 jt | 90,39 % | 79,01 % | 77,22 % |
| 13. | Tercapainya target BPHTB |   |   |   | 600.000.000 | 650 Juta | 858,34 jt | 684,2 jt | 695,9 jt | 1,1 M | 109,91 % | 107,07 % | 134,75 % |
| 14. | Tersedianya data / dokumen peraturan pajak daerah |   |   |   | 1 Perwako | 1 Perwako | - | 1 rancangan perwako BPHTB | 1 rancangan perub. Perwako Pajak Daerah | - | 100% | 100% | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD** | **Target SPM** | **Target IKK** | **Target Indikator Lainnya** | **Target Renstra OPD Tahun ke-** | **Realisasi Capaian tahun ke-** | **Rasio Capaian pada Tahun ke-** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2014** | **2015** | **2016** | **2014** | **2015** | **2016** |
| ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | ( 5 ) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | ( 9 ) | ( 10 ) | ( 11 ) | ( 12 ) | ( 13 ) | ( 14 ) |
| 15. | Bertambah / meningkatnya jumlah objek pajak daerah |   |   |   | 130 objek pajak | - | - | 0 | - | - | 0% | - | - |
| 16. | Meningkatnya pemahaman SDM tantang peraturan Daerah PBB-P2 |   |   |   | 500 orang / 16 kelurahan | - | - | 0 | - | - | 0% | - | - |
| 17. | Tersedianya kajian potensi PAD |   |   |   | - | 1 Dokumen | - | - | 1 rancangan Perub. Perwako pajak Daerah | - | - | 100% | - |
| 18. | Buku semesteran dan tahunan BMD dan buku risalah lelang dan penghapusan BMD |   |   |   | 70 buku ( 27 SKPD ) | 70 Buku ( 27 SKPD ) | 70 Buku ( 27 SKPD ) | 70 buku ( 27 SKPD ) | 70 buku ( 27 SKPD ) | 70 buku ( 27 SKPD ) | 100% | 100% | 100% |
| 19. | Terdatanya kebutuhan pengadaan BMD dan Pemeliharaan BMD ( buku daftar rencana kebutuhan BMD dan rencana kebutuhan pemeliharaan BMD ) |   |   |   | 45 buku ( 27 SKPD ) | 45 buku ( 27 SKPD ) | 90 buku ( 27 SKPD ) | 45 buku ( 27 SKPD ) | 45 buku ( 27 SKPD ) | 90 buku ( 27 SKPD ) | 100% | 100% | 100% |
| 20. | Jumlah aset tanah yang diberi plang nama tanah |   |   |   | 27 SKPD / 203 persil tanah | - | - | 27 SKPD / 203 persil tanah | - | - | 100% | - | - |
| 21. | Tersajinya data daerah (BMD) secara periodik dan valid |   |   |   | 60 buku ( 27 SKPD ) | 60 buku ( 27 SKPD ) | 60 buku ( 27 SKPD ) | 60 buku ( 27 SKPD ) | 60 buku ( 27 SKPD ) | 60 buku ( 27 SKPD ) | 100% | 100% | 100% |
| 22. | Jumlah kendaraan, bangunan dan pasar yang diasuransikan |   |   |   | 265 unit | 426 unit | - | 405 unit | 426 unit | - | 152,83% | 100% | - |
| **NO** | **Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD** | **Target SPM** | **Target IKK** | **Target Indikator Lainnya** | **Target Renstra OPD Tahun ke-** | **Realisasi Capaian tahun ke-** | **Rasio Capaian pada Tahun ke-** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2014** | **2015** | **2016** | **2014** | **2015** | **2016** |
| ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | ( 5 ) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | ( 9 ) | ( 10 ) | ( 11 ) | ( 12 ) | ( 13 ) | ( 14 ) |
| 23. | Terlaksananya penilaian terhadap aset-aset rusak berat yang telah dihapuskan untuk tujuan pelelangan |   |   |   | - | 75 laporan penilaian dari KPKNL | - | - | 75 laporan penilaian dari KPKNL | - | - | 100% | - |
| 24. | Terlaksananya penilaian terhadap tanah pasar pusat yang akan dijadikan objek perjanjian kerjasama dengan investor |   |   |   | - | 1 Laporan penilaian tanah | - | - | 1 Laporan penilaian tanah | - | - | 100% | - |
| 25. | Jumlah Polis Asuransi yang dihasilkan |   |   |   | - | - | 5 Polis | - | - | 5 Polis | - | - | 100% |

|  |
| --- |
| TABEL 2.16.b |
| **Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD BPKD** |
| **Kota Padang Panjang** |
| **NO** | **Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD** | **Target SPM** | **Target IKK** | **Target Indikator Lainnya** | **Target Renstra OPD Tahun 2017** | **Realisasi Capaian tahun 2017** | **Rasio Capaian pada Tahun 2017** |
|
| ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | ( 5 ) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) |
| 1. | Tersedianya Sisitem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbasis aplikasi dalam penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan , pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan daerah |   |   |   | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Tersedianya Kajian PAD Kota Padang Panjang |   |   |   | 1 Kajian | - | 0% |
| 3. | Terlaksananya Kajian Investasi Daerah |   |   |   | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 50% |
| 4. | Penerapan Inpres No.1 tahun 2013 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di bidang penganngaran |   |   |   | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100% |
| 5. | Tersusunya laporan penatausahaan keuangan daerah yang andal dan tepat waktu |   |   |   | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100% |
| 6. | Terwujudnya sistem akuntabilitas keuangan daerah yang diyakini kewajarannya |   |   |   | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% |
| 7. | Meningkatnya pendapatan daerah dengan terdatanya sumber-sumber pendapatan daerah |   |   |   | 14.000 OP | 13.8 | 97,97% |
| 8. | Terkelolanya Aset Daerah |   |   |   | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| 9. | Terdatanya kebutuhan Pengadaan BMD dan Pemelihaan BMD |   |   |   | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% |
| 10. | Tersajinya data daerah ( BMD ) secara periodik dan valid |   |   |   | 60 buku | 60 buku | 100% |
| 11. | Jumlah polis asuransi yang dihasilkan |   |   |   | 4 polis | 4 polis | 100% |
| 15. | Tertatanya manajemen aset / barang daerah |   |   |   | 1 Ranperda | 1 Ranperda | 100% |

|  |
| --- |
| TABEL 2.16.c |
| **Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD BPKD** |
| **Kota Padang Panjang** |
| **NO** | **Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD** | **Target SPM** | **Target IKK** | **Target Indikator Lainnya** | **Target Renstra OPD Tahun 2017** | **Realisasi Capaian tahun 2017** | **Rasio Capaian pada Tahun 2017** |
|
| ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | ( 5 ) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) |
| 1. | Persentase ASN yang mengikuti diklat dan Bimtek |   |   |   | 50% | 48,7% | 96,73% |
| 2. | Penyusunan APBD/APBDP Kota Padang Panjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai Inpres No.1 Tahun 2013 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di bidang penganggaran |   |   |   | Tepat  | Tepat  | 100% |
| 3. | Opini BPK terhadap laporan keuangan  |   |   |   | WTP | WTP | 100% |
| 4. | Persentase Peningkatan target Pendapatan Asli daerah |   |   |   | - 4,76% | - 10,23% | 94,25% |
| 5. | Persentase Pendapatan asli daeerah terhadap penerimaan daerah |   |   |   | 15% | 14,44% | 96,27% |
| 6. | Tersedianya data objek pajak yang tervalidasi |   |   |   | 90% | 90% | 100% |
| 7. | Persentase pemanfaatan aset daerah |   |   |   | 70% | 93,21% | 132,90% |
| 8. | Persentase terdatanya kebutuhan pengadaan BMD dan Pemeliharaan BMD |   |   |   | 90% | 90% | 100% |

**TABEL 2.17**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKD**

**Kota Padang Panjang**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Uraian** | **Anggaran pada Tahun ke-** | **Realisasi Anggaran pada Tahun ke-** | **Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-** | **Rata-rata Pertumbuhan** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Anggaran** | **Realisasi** |
| **( 1 )** | **( 2 )** | **( 3 )** | **( 4 )** | **( 5 )** | **( 7 )** | **( 7 )** | **( 8 )** | **( 9 )** | **( 10 )** | **( 12 )** | **( 12 )** | **( 13 )** | **( 14 )** | **( 15 )** | **( 16 )** | **( 17 )** | **( 18 )** | **( 19 )** |
| **I** | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | Penyediaan jasa surat menyurat | 5,900,000 | 6,800,000 | 5,000,000 | 6,800,000 | 9,875,000 | 4,762,500 | 6,324,000 | 4,586,500 | 5,712,000 | 4.500.000  | 81% | 93% | 92% | 84% | 47%  | 6,875,000 | 5,224,333 |
| 2. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 114,200,000 | 175,000,000 | 151,600,000 | 165,800,000 | 194,600,000 | 65,907,129 | 101,012,789 | 125,420,976 | 142,996,086 | 141,000,923  | 58% | 58% | 83% | 86% |  74% | 160,240,000 | 97,446,965 |
| 3. | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 733,225,000 | 763,025,000 | 581,324,196 | 563,050,000 | 519,834,292 | 640,092,123 | 714,550,886 | 581,324,196 | 563,019,000 |  514,104,292 | 87% | 94% | 100% | 100% | 99%  | 632,091,698 | 645,322,402 |
| 4. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional | 377,648,000 | 356,156,000 | 409,645,920 | 469,145,520 | 458,045,520 | 314,290,500 | 262,322,665 | 312,457,901 | 372,189,434 |  329,622,223 | 83% | 74% | 76% | 79% |  72% | 414,128,192 | 296,357,022 |
| 5. | Penyediaan Jasa administrasi keuangan | 805,150,000 | 881,765,000 | 1,147,700,000 | 1,359,600,000 | 425,000,000 | 726,220,000 | 743,318,678 | 1,142,628,305 | 1,293,700,000 | 0  | 90% | 84% | 100% | 95% |  0% | 923,843,000 | 870,722,328 |
| 6. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 118,539,000 | 263,983,000 | 342,661,430 | 365,881,725 | 380,066,725 | 106,718,000 | 229,625,000 | 306,249,860 | 335,054,326 |  290,975,489 | 90% | 87% | 89% | 92% | 78%  | 294,226,376 | 214,197,620 |
| 7. | Penyediaan alat tulis kantor | 173,044,000 | 150,000,000 | 131,250,000 | 130,000,000 | 125,000,000 | 121,987,500 | 128,724,000 | 130,762,500 | 128,506,500 |  105,240,000 | 70% | 86% | 100% | 99% |  84% | 141,858,800 | 127,158,000 |
| 8. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 228,980,000 | 234,469,000 | 184,760,000 | 192,070,000 | 250,425,000 | 125,506,500 | 120,091,150 | 140,342,300 | 115,774,700 |  142,427,000 | 55% | 51% | 76% | 60% | 58%  | 218,140,800 | 128,646,650 |
| 9. | Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | 9,917,000 | 18,000,000 | 7,827,000 | 7,827,000 | 15,000,000 | 2,975,000 | 17,982,000 | 3,912,500 | 7,010,000 |  10,956,000 | 30% | 100% | 50% | 90% |  68% | 11,714,200 | 8,289,833 |
| 10. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 800,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 732,200 | 992,000 | 0 | 0 |  0 | 92% | 66% | 0% | 0% | 0%  | 460,000 | 862,100 |
| 11. | Penyediaan makanan dan minuman | 162,000,000 | 114,500,000 | 131,340,000 | 99,000,000 | 115,000,000 | 52,752,150 | 72,996,000 | 70,996,200 | 52,406,200 |  44,984,100 | 33% | 64% | 54% | 53% |  43% | 124,368,000 | 65,581,450 |
| 12. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 480,000,000 | 510,000,000 | 474,880,000 | 735,100,000 | 840,000,000 | 354,601,309 | 501,040,908 | 473,837,111 | 695,893,612 |  716,868,175 | 74% | 98% | 100% | 95% |  90% | 607,996,000 | 443,159,776 |
| 13. | Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran | 43,300,000 | 42,500,000 | 26,472,680 | 31,412,000 | 168,244,600 | 43,300,000 | 41,100,000 | 26,461,340 | 31,365,876 | 67,849,632  | 100% | 97% | 100% | 100% |  41% | 62,385,856 | 36,953,780 |
| 14. | Pencetakan DAGDA dengan sistem komputerisasi | 59,700,000 | 24,550,000 | 52,550,000 | 51,400,000 | 0 | 41,810,000 | 20,850,000 | 42,700,000 | 49,710,000 |  0 | 70% | 85% | 81% | 97% |  0% | 37,640,000 | 35,120,000 |
| 15. | Premi tenaga kerja dan kesehatan masyarakat | 125,000,000 | 27,430,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%  | 30,486,000 | 0 |
| 16. | Penyediaan sewa tanah | 45,000,000 | 45,000,000 | 46,878,222 | 71,000,000 | 71,000,000 | 31,703,199 | 39,341,615 | 37,888,222 | 64,111,364 |  60,800,000 | 70% | 87% | 81% | 90% |  87% | 55,775,644 | 36,311,012 |
| **II** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17. | Pengadaan kendaraan dinas / operasional | 401,110,000 | 733,845,000 | 20,055,000 | 254,315,612 | 217,870,000 | 0 | 722,852,500 | 20,055,000 | 254,315,612 |  217,870,000 | 0% | 99% | 100% | 100% |  100% | 325,439,122 | 371,453,750 |
| 18. | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 72,500,000 | 1,023,390,000 | 119,777,387 | 545,005,995 | 503,940,000 | 48,850,000 | 849,575,000 | 119,777,387 | 545,005,955 |  452,669,600 | 67% | 83% | 100% | 100% | 94%  | 452,922,676 | 339,400,796 |
| 19. | Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor | 167,500,000 | 80,850,000 | 84,316,100 | 65,000,000 | 130,000,000 | 100,388,000 | 21,925,000 | 61,238,280 | 43,034,372 | 73,507,100  | 60% | 27% | 73% | 66% |  54% | 105,533,220 | 61,183,760 |
| 20. | Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat kantor | 77,350,000 | 107,300,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 42,500,000 | 18,930,000 | 26,575,000 | 15,263,000 | 14,178,000 |  35,000,000 | 24% | 25% | 51% | 35% | 81%  | 59,430,000 | 20,256,000 |
| 21. | Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah | 0 | 0 | 0 | 6,580,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829,680 |  0 | 0% | 0% | 0% | 13% | 0%  | 1,316,129 | 0 |
| **III** | **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22. | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya | 41,000,000 | 45,000,000 | 0 | 0 | 64,800,000 | 21,250,000 | 41,220,000 | 0 | 0 |  64,800,000 | 52% | 92% | 0% | 0% |  100% | 30,160,000 | 31,235,000 |
| **IV** | **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23. | Bimibingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | 100,000,000 | 50,000,000 | 75,000,000 | 89,550,000 | 170,000,000 | 21,150,000 | 20,750,000 | 43,000,000 | 87,500,000 |  164,442,050 | 21% | 42% | 57% | 98% |  98% | 96,910,000 | 28,300,000 |
| **V** | **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keinerja SKPD | 1,907,500 | 960,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908,000 | 0 | 0 |  0 | 0% | 95% | 0% | 0% | 0%  | 573,500 | 908,000 |
| 25. | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | 1,204,000 | 1,354,000 | 0 | 0 | 0 | 1,204,000 | 1,351,000 | 0 | 0 |  0 | 100% | 100% | 0% | 0% |  0% | 511,600 | 1,277,500 |
| 26. | Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran | 996,000 | 1,025,000 | 0 | 0 | 0 | 996,000 | 1,025,000 | 0 | 0 |  0 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%  | 404,200 | 1,010,500 |
| 27. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 6,910,000 | 2,630,000 | 0 | 0 | 0 | 5,838,800 | 2,256,000 | 0 | 0 |  0 | 84% | 86% | 0% | 0% |  0% | 1,908,000 | 4,047,400 |
| 28. | Penyusunan Pelaporan keuangan Semesteran Daerah | 23,750,000 | 24,600,000 | 9,725,000 | 9,725,000 | 11,830,000 | 21,256,350 | 22,200,000 | 9,296,400 | 8,800,000 |  10,420,000 | 90% | 90% | 96% | 90% | 92%  | 15,926,000 | 17,584,250 |
| 29. | Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi anggaran daerah | 10,825,000 | 12,171,000 | 2,233,500 | 2,333,500 | 2,225,500 | 8,152,500 | 8,242,000 | 1,956,300 | 1,775,000 |  1,465,500 | 75% | 68% | 88% | 76% | 69%  | 5,957,700 | 6,116,933 |
| 30. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun daerah | 471,000,000 | 48,500,000 | 58,750,000 | 49,300,000 | 171,980,000 | 21,277,000 | 43,586,000 | 54,108,100 | 46,539,400 |  106,796,240 | 5% | 90% | 92% | 94% | 62%  | 159,906,000 | 39,657,033 |
| 31. | Verifikasi data laporan keuangan SKPD | 33,122,000 | 35,490,000 | 7,760,000 | 7,760,000 | 13,394,000 | 32,310,000 | 30,181,950 | 6,903,500 | 4,460,800 |  10,996,000 | 98% | 85% | 89% | 57% |  78% | 19,505,200 | 23,131,817 |
| **VI** | **PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 32. | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah | 0 | 0 | 0 | 16,275,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,147,200 | 0  | 0% | 0% | 0% | 68% |  0% | 3,255,000 |   |
| 33. | Penyusunan standar satuan harga | 48,650,000 | 29,700,000 | 0 | 0 | 0 | 38,374,350 | 21,775,400 | 0 | 0 |  0 | 79% | 73% | 0% | 0% | 0%  | 15,670,000 | 30,074,875 |
| 34. | Penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah | 43,782,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,291,250 | 0 | 0 | 0 |  0 | 12% | 0% | 0% | 0% |  0% | 8,756,500 | 5,291,250 |
| 35. | Penyusunan Ranperda tentang APBD | 217,613,000 | 195,075,000 | 249,300,000 | 208,187,500 | 365,195,000 | 109,623,900 | 96,025,800 | 138,985,300 | 191,351,193 |  316,368,388 | 50% | 49% | 56% | 92% | 90%  | 247,074,100 | 114,878,333 |
| 36. | Penyusunan Ranper KDH tentang penjabaran APBD | 48,150,000 | 48,400,000 | 0 | 0 | 0 | 16,505,225 | 33,686,000 | 0 | 0 |  0 | 34% | 70% | 0% | 0% | 0%  | 19,310,000 | 25,095,613 |
| 37. | Penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD | 189,513,000 | 193,275,000 | 108,700,000 | 109,450,000 | 183,690,000 | 92,216,250 | 84,747,500 | 85,505,700 | 95,800,000 |  155,698,750 | 49% | 44% | 79% | 88% | 86%  | 156,925,600 | 87,489,817 |
| 38. | Penyusunan Ranper KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD | 36,267,500 | 40,600,000 | 0 | 0 | 0 | 25,606,500 | 27,602,000 | 0 | 0 |  0 | 71% | 68% | 0% | 0% | 0%  | 15,373,500 | 26,604,250 |
| 39. | Penyusunan Ranperda KDH tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD | 138,209,000 | 84,102,500 | 80,065,000 | 80,480,000 | 90,770,000 | 66,772,425 | 69,307,500 | 75,057,100 | 66,689,800 |  73,370,630 | 48% | 82% | 94% | 83% | 83%  | 94,725,300 | 70,379,008 |
| 40. | Penyusunan Ranper KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawab Pelaksanaan APBD | 42,808,000 | 52,100,000 | 0 | 0 | 0 | 28,228,050 | 41,885,300 | 0 | 0 |  0 | 66% | 80% | 0% | 0% |  0% | 18,981,600 | 35,056,675 |
| 41. | Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah | 271,660,000 | 247,400,000 | 286,140,000 | 312,700,000 | 313,000,000 | 87,490,935 | 130,892,487 | 257,128,813 | 240,209,084 |  195,882,950 | 32% | 53% | 90% | 77% |  67% | 286,180,000 | 158,504,078 |
| 42. | Bintek Implementasi Paket Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah | 209,351,000 | 341,782,000 | 0 | 0 | 0 | 93,004,500 | 207,305,000 | 0 | 0 |  0 | 44% | 61% | 0% | 0% |  0% | 110,226,600 | 150,154,750 |
| 43. | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah | 143,870,000 | 101,165,000 | 73,340,000 | 390,702,000 | 439,125,000 | 78,744,000 | 80,524,271 | 63,160,000 | 349,468,653 |  369,749,867 | 55% | 80% | 86% | 89% |  83% | 229,640,400 | 74,142,757 |
| 44. | Penelitian dan Penggandaan DPA-SKPD dan DPPA SKPD | 95,288,000 | 215,400,000 | 88,500,000 | 76,195,000 | 41,110,000 | 58,794,225 | 115,718,700 | 26,545,800 | 51,947,200 |  26,674,150 | 62% | 54% | 30% | 68% |  60% | 103,298,600 | 67,019,575 |
| 45. | Peningkatan Wawasan Aparat Pemungut PBB, Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah | 350,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331,600,700 | 0 | 0 | 0 |  0 | 95% | 0% | 0% | 0% |  0% | 70,000,000 | 331,600,700 |
| 46. | Pendataan Objek Pajak | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 252,570,000 | 0 | 0 | 0 | 94,659,700 |  238,048,100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 92%  | 70,514,000 |   |
| 47. | Rekonsiliasi Keuangan Daerah | 41,625,000 | 0 | 0 |  0 |  0 | 29,266,475 | 0 | 0 | 0 | 0  | 70% | 0% | 0% | 0% | 0%  | 8,325,000 | 29,266,475 |
| 48. | Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan PBB-P2 serta BPHTB | 320,430,000 | 244,100,000 | 275,085,000 | 400,000,000 | 196,650,000 | 202,473,950 | 198,790,529 | 195,274,368 | 374,099,796 |  137,621,848 | 63% | 81% | 71% | 94% | 76%  | 287,253,000 | 198,846,282 |
| 49. | Penyusunan Revisi Rancangan Perwako BPHTB | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,350,000 | 0 | 0 | 0 |  0 | 31% | 0% | 0% | 0% |  0% | 6,000,000 | 9,350,000 |
| 50. | Penyusunan Laporan Semester dan Tahunan BMD | 24,155,000 | 22,400,000 | 7,010,000 | 7,010,000 | 17,040,000 | 23,945,600 | 12,761,000 | 3,759,500 | 6,458,600 |  15,722,800 | 99% | 57% | 54% | 92% |  86% | 15,523,000 | 13,488,700 |
| 51. | Penghapusan dan Penjualan BMD | 66,925,000 | 75,290,000 | 111,115,000 | 119,580,000 | 129,525,000 | 17,727,300 | 42,045,300 | 69,382,900 | 81,403,000 |  11,736,000 | 26% | 56% | 62% | 68% |  10% | 100,487,000 | 43,051,833 |
| 52. | Penyusunan RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD | 73,480,000 | 76,820,000 | 96,200,000 | 58,550,000 | 14,215,000 | 70,973,000 | 75,465,500 | 92,040,000 | 50,663,400 |  6,329,600 | 97% | 98% | 96% | 87% | 47%  | 63,853,000 | 79,492,833 |
| 53. | Sosialisasi Perda PBB-P2 | 138,665,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%  | 27,733,000 | 0 |
| 54. | Pengkajian Potensi PAD Kota Padang Panjang | 173,800,000 | 232,710,000 | 0 | 43,000,000 | 0 | 0 | 217,121,645 | 0 | 0 |  0 | 0% | 93% | 0% | 0% | 0%  | 89,902,000 | 217,121,645 |
| 55. | Penyajian Data Aset Daerah | 41,745,000 | 32,090,000 | 10,940,000 | 10,940,000 | 11,620,000 | 20,684,000 | 7,671,000 | 6,566,200 | 7,773,400 |  11,527,000 | 50% | 24% | 60% | 71% |  100% | 21,467,000 | 11,640,400 |
| 56. | Pemasangan Plang Nama Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Padang Panjang | 195,473,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,416,900 | 0 | 0 | 0 |  0 | 90% | 0% | 0% | 0% | 0%  | 39,094,600 | 175,416,900 |
| 57. | Penyusunan Perubahan Rancangan Perwako Pajak Daerah | 0 | 23,950,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,934,700 | 0 | 0 |  0 | 0% | 83% | 0% | 0% | 0%  | 4,790,000 | 19,934,700 |
| 58. | Pengkajian Investasi Daerah | 0 | 16,885,000 | 34,600,000 | 69,050,000 | 69,050,000 | 0 | 11,885,000 | 0 | 25,911,000 |  0 | 0% | 70% | 0% | 38% | 0%  | 37,917,000 | 11,885,000 |
| 59. | Penilaian Aset Daerah | 0 | 83,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,985,000 | 0 | 0 |  0 | 0% | 70% | 0% | 0% | 0%  | 16,750,000 | 58,985,000 |
| 60 | Penyusunan Standar Biaya | 0 | 0 | 29,800,000 | 45,960,000 | 5,830,000 | 0 | 0 | 25,010,000 | 25,010,000 |  4,004,300 | 0% | 0% | 84% | 54% | 80%  | 16,318,000 | 25,010,000 |
| 61 | Penyusunan Perubahan RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,090,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  3,727,100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 28%  | 2,418,000 | 0 |
| 62 | Penghapusan data piutang penyerahan PBB-P2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  10,819,700 | 0% | 0% | 0% | 0% |  86% | 2,400,000 | 0 |
| 63 | Penyusunan Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,567,200 |  0 | 0% | 0% | 0% | 81% |  0% | 10,000,000 | 0 |

* 1. **Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah**

Dalam melaksanakan pelayanan sebagai wujud dari pelaksanaan program kerja, Badan Pengelola Keuangan DaerahKota Padang Panjang menghadapi beberapa masalah atau tantangan. Tantangan tersebut meliputiSumber Daya manusia, Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal Pengelolaan Pendapatan Daerah, tantangan-tantangan yang dihadapi meliputi:
2. Terbatasnya Sumber dan Potensi Pendapatan Daerah, terutama berkaitan dengan peningkatan PAD yang disebabkan belum Optimalnya Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah, pelaksanaan administrasi Pendapatan Daerah sebagai piranti dalam mendorong akselerasi penerimaan PAD yang masih relative lemah dan masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kesadaran sebagai wajib pajak*.*
3. Dengan pengalihan beberapa jenis pajak dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten/Kota maka Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang selama ini dikelola oleh KPP Pratama terhitung mulai tahun 2014 PBB-P2 menjadi salah satu jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini tentu sajaakan menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam hal peningkatan PAD yang akan mendanai pembangunan Kota Padang Panjang. Disamping itu Pembaharuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) harus dilakukan penghitungan kembali paling tidak 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun harus diubah, sesuai dengan perkembangan laju pembangunan.
4. Dalam hal Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah tantangan yang dihadapi meliputi:
5. Terjadinya perubahan-perubahan peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah baik tentang penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dimana diperlukan penyesuaian-penyesuaian kembali dalam pelaksanaaan pengelolaan keuangan daerah tingkat OPD dan BPKD.
6. Keterbatasan pemahaman tentang SAP baik di tingkat OPD maupun di BPKD, hal ini akan berimbas kepada Penyusunan Laporan Keuangan pada OPB dan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Daerah.
7. Dalam hal Aset Daerah tantangan yang dihadapi meliputi:
	1. Belum terosialisasinya Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga berakibat terhadap pelaporan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang di kelola Pemerintah Kota Padang Panjang.

b. Masih adanya kesalahan administrasi yang berakibat pada tertundanya pelaksanaan kegiatan yang melalui mekanisme lelang, bahkan ada beberapa kegiatan yang akhirnya tidak jadi dilaksanakan karena waktu yang tersisa sudah tidak memungkinkan.

1. Terdapatnya asset yang menganggur dan tidak dimanfaatkan .
2. Aset yang di peroleh dari Hibah/Pinjam pakai dari Pemerintah Pusat dan Daerah tidak dilengkapi dengan Dokumen pendukung.

Tantangan tersebut di atas harus dijawab oleh Badan Pengelola Keuangan Daerahdan dengan memanfaatkan setiap peluang yang dimiliki, yaitu :

1. Melakukan penyamaan persepsi antara OPD dengan BPKD terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peningkatan kualitas SDM melului pelatihan dan bimtek terkait pengelolaan keuangan daerah.
2. Memaksimalkan upaya intensifikasi, ekstensifikasi PAD memalui pengkajian dan pemetaan potensi PAD melalui Penyempurnaan Perda dan Perwako di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah dan pengoptimalkan manajemen pengelolaan, mulai dari perencanaan sampai pengendalian dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah serta Melakukan Sosialisasi dan pendekatan secara persuasive kepada masyarakat tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Dengan keluarnya Perda No.1 tahun 2016, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013, tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan menjadi peluang bagi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam Peningkatan Pendapatan PBB-P2 serta Mengoptimalkan kinerja penagihan dilapangan terutama pada Kelurahan-kelurahan, Kecamatan dan BPKD untuk mengoptimalkan Pendapatan yang bersumber dari PBB- P2.
4. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Provinsi, baik melalui lintas sektor dan program.
5. Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang membantu proses penganggaran, penatahusahaa, pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah.
6. Semangat untuk memperoleh opini WTP.

**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGISPERANGKAT DAERAH**

* 1. **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Sebagaimana diuraikan pada Bab sebelummya bahwa Tugas BPKD adalah membantu Walikota melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas BPKD menghadapipermasalahan dalam pelaksanaan pelayanansebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPKD**

**Kota Padang Panjang**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aspek Kajian | Capaian/Kondisi Saat ini | Standar yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi | Permasalahan Pelayanan OPD |
| Internal (Kewenangan OPD) | Eksternal(Diluar Kewenangan OPD) |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | 1. PAD belum optimal | 1.   Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan. | 1. Jumlah SDM yg kurang (Petugas pemungut pajak) | 1.   Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak | 1. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan belum optimal |
| 2. Belum adanya juru sita pajak daerah | 2. Ketersediaan data dasar potensi pendapatan masih terbatas |  |
|   |  | 3. Belum adanya PPNS pajak dan retribusi daerah | 3. Beberapa OPD berusaha untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan, yang merupakan salah satu ukuran kinerja dan keberhasilan OPD.4. Tidak seluruh masyarakat memahami peraturan tentang pajak dan retribusi daerah | 2. Belum optimalnya penegakan perangkat peraturan tentang pajak dan retribusi3. Masih adanya Potensi Pendapatan yang belum dapat di ambil untuk meningkatkan PAD. |
| Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah | 1.Sebagian besar aset daerah yang menganggur dan tidak dimanfaatkan2. Aset yang diperoleh dari Hibah/Pinjam Pakai dari Pemerintah pusat dan propinsi tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung | 1.  Peraturan dan Dokumen yang mengatur tentang aset daerah | 1. kurang tertibnya pemanfaatan aset daerah2. Belum tersedianya data pendukung aset yang berasal dari hibah/pinjam pakai pemerintah pusat dan propinsi | 1. kurangnya pemahaman dan kesadaraan dalam menggunakan aset pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. sering terjadinya pergantian pejabat pengurus, penyimpan dan pembantu pengurus barang
 | Kurang optimalnya pengelolaan aset daerah |
| Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang | Wajar Tampa Pengecualian (WTP)  |  Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang | Temuan BPK atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah  | Masih kurangnya koordinasi dalam pencatatan dan pengelolaan aset antara SKPDInduk dengan UPTD | Untuk mempertahankan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan menyelesaikan seluruh temuan BPK. |

**Tabel 3.2**

**Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)**

|  |  |
| --- | --- |
| No | Isu Strategis |
| Dinamika Internasional | Dinamika Nasional | DinamikaRegional/Lokal | Lain-lain |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Tingginya animo negara-negara donor dalam menjalin kerjasama dengan Indonesia | Situasi politik dan ekonomi di pusat yang kondusif dan terkendali | 1. Terjalinnya kerja sama pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan bebarapa lembaga Donor dan pihak swasta dalam negeri untuk peningkatan Sumber Daya Manusia.
 |  |
| 2 | MDGS dan lembaga PBB proaktif terhadap permasalahan pembangunan | Good gevernance dan clean goverment menjadi isu yang terus digulirkan dan meningkatnya pembiayaan terhadap daerah miskin | 1. Adanya perhatian pemerintah pusat terhadap Pembangunan Daerah Tertinggal/Daerah Miskin dan Pengembangan Wilayah Kepulauan.
 |  |
| 3 | Negara-negara kaya memiliki perhatian serius terhadap negara sedang berkembang dan negara miskin | Meningkatnya kerjasama antara pemerintah dan negara-negara donor | 1. Semakin meningkatnya perkembangan investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum.
 |  |
| 4 | Meningakatnya kerjasama antara negara  | Partisipasi masyarakat menjadi isu yang sangat kuat dalam berbagai regulasi perencanaan di tingkat pusat | 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
 |  |

* 1. **Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Berdasarkan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 telah ditetapkan Visi dan Misi Kota Padang Panjang yang akan dicapai untuk 5 (Lima) tahun kedepan. Adapun Visi Kota Padang Panjang adalah UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT.

Berdasarkan pengertian visi yang dikemukakan diatas, serta untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, ditetapkanlah 3 misi yang akan dilaksanakan dalam periode 5 tahun mendatan. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Saerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan;
2. Meningkatkan Pemerataan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovasf dan Partisipatif.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kota Padang Panjang, BPKD berkontribusi untuk mewujudkan misi yang ada dalam RPJMD yaitu misi 3 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovasf dan Partisipatif. Mencermati dinamika kehidupan bernegara yang menuntut proses penegakan hukum secara adil dan merata, maka pada RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 adalah untuk menjadi acuan dan pedoman oleh seluruh jajaran Pemerintah Kota Padang Panjang agar mempersiapkan program kerja tahunan yang dapat menuntun dan membentuk arah agar Pemerintah Kota Padang Panjang baik secara personal maupun secara Institusi tidak terjerat kasus hukum. Khusus untuk BPKD yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagai tugas Kepala Daerah dalam bidang penyelenggaraan keuangan daerah yang sangat rentan timbulnya berbagai penyimpangan makanya perlu membekali sistem kerja dan rencana kegiatan yang betul-betul berpedoman dan mengacu kepada hukum dan aturan tentang pengelolaan keuangan daerah baik yang mengacu kepada regulasi yang diterbitkan oleh Induk Organisasi seperti Departemen Dalam Negeri maupun Kementrian Keuangan.

Opini WTP adalah suatu kebutuhan pengakuan bagi setiap pemda terhadap terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel yang dapat diyakini kewajarannya.Mempertahankan opini WTP tidak hanya dapat dipandang sebatas obsesi Kepala Daerah tetapi mutlak sebagai kebutuhan setiap Pemerintah Daerah untuk meyakini kebenaran pelaksanaan pendaerahan yang dipimpinnya.

* 1. **Telaahan Renstra Propinsi**

Bertitik tolak dari Sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu Meningkatnya status opini BPK terhadap laporan keuangan, sebagaimana tercantum dalam bagian Prioritas Pembangunan daerah yaitu Pelaksanaan Reformasi Borokrasi dalam Pemerintahan, maka untuk mencapai sasaran tersebut perlu juga mendefinisikan factor pendorong serta factor enghambat permasalahan pelayanan yang akan mempengaruhi tercapainya sasaran yang ditetapkan.

* 1. **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Stratgis (KLHS)**

Pada prinsipnya program dan kegiatan pada BPKD Kota Padang Panjang secara khusus tidak terkait langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

* 1. **Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai pernyataan visi.

Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang perencanaan, dalam upaya pencapaian visi dan misi BPKD maupun Visi dan Misi pembangunan daerah

Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan Renstra menggunakan metode analisis SWOT. Analisis ini memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Untuk itu BPKD sebagai instasi pengelola keuangan daerah perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal yang sifatnya Controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan serta mengenal kondisi-kondisi elemen external yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis

Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, sebagai berikut :

Dalam Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama 5 (lima) tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 – 2023, maka harus di perhatikan faktor internal seperti kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman guna menentukan langkah-langkah kedepan.

**Tabel. 3.3**

**KELEMAHAN, KEKUATAN, PELUANG DAN ANCAMAN**

|  |  |
| --- | --- |
| **KELEMAHAN** | **KEKUATAN** |
| * 1. Kurangnya  peremajaan  SDM  yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.
	2. Reward dan Punishment belum disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan ukuran kinerja.
	3. Jarang  mengikuti diklat fungsional perpajakan, pengelolan keuangan dan Aset Daerah
	4. Sarana dan prasarana belum sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan.
 | 1. Tersedianya Perda, Perwal dan Keputuan Gubernur tentang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Pengalaman empirik dari Sumberdaya Manusia dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.
4. Kesiapan SDM dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja yang ditetapkan dalam peraturan Walikota Sikap tenggang rasa dari sesama aparat cukup tinggi.
 |
| **Peluang** | **Ancaman** |
| Laju pertumbuhan Ekonomi selama beberapa tahun lalu menunjukan angka positif dan progresif.Potensi Wajib Pajak dan Retribusi mengalami tren kenaikan yang positif.Pusat Kegiatan Wilayah menjadi daya magnit terhadap hak dan kewajiban daerah | Fluktuasi ekonomi makro semakin tidak jelas yang berdampak pada ekonomi mikroKetidaksabaran masyarakat dalam menghadapi globalisasiKebebasan dalam mengakses informasi keuangan melalui dunia maya.Perubahan aturan yang cepat mendorong penata usahan keuangan tidak sesuai dengan kondisi yang adaPekerjaan bertumpuk dalam waktu bersamaan |

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, maka isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD 5(lima) ke tahun depan, adalah :

1. *Peningkatan Pengelolaan keuangan Daerah*
2. *Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan PAD*

**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

**Tujuan dan Sasaran**

Dalam rangka pencapaian target kerja untuk lima tahun ke depan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang perlu menetapkan tujuan sebagai langkah awal pelaksanaan tugas.

* 1. **TUJUAN**

Tujuan yang ingin dicapai lima tahun kedepan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah ***“Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Transparan dan Akuntabel”***

* 1. **SASARAN**

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut,maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2019-2023 adalah :

* 1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah
	2. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran serta indikator masing-masing sasaran dan target kinerja tahunan dapat dijelaskan melalui tabel berikut :

**Tabel. 4**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD**

**BPKD Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Tujuan/ Sasaran**  | **Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke 5** | **Target Kinerja Sasaran** | **Definisi Operasional** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |   |
| 1 | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah |   | Opini Atas laporan Keuangan Pemerintah daerah | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |   |
|   | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Ketepatan Penyajian laporan Keuangan sesuai SAP | Tepat  | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Penyampaian Nota Penyusunan APBD dan APBD perubahan, Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun daerah, penyusunan RKBMD dan penyajian data aset sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan |
|   |   | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah  | 25% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | Realisasi awal tahun Renstra X 5% ditambah Realisasi tahun awal Renstra |

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**4.2.1 Strategi**

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Untuk pencapaian tujuan yang telah di tetapkan BPKD Kota padang Panjang menggunakan strategi sebagai berikut :

* + - * 1. Stategi yang digunakan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah digunakan dua strategi yaitu :
	1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah, strategi ini sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemrintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab.
	2. Disiplin anggaran, strategi ini bertujuan untuk program yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan Antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
	3. Efisiensi dan efektivitas anggaran yaitu dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal, sehingga di dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh.
		+ - 1. Untuk pencapaian Sasaran Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD digunakan 3 stategi yaitu :
				2. Meningkatkan pengawasan pada setiap pos penerimaan sehingga bisa mengurangi kebocoran penerimaan.
				3. Melakukan pendataan potensi sumber-sumber penerimaan yang sudah ada maupun penggalian potensi baru.
				4. Mengintensifkan penagihan dan peningkatan monitoring.

**4.2.2 Kebijakan**

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.

Berikut ini penjelasan dan uraian dari strategi dan kebijakan yang dilakukan sebagai berikut:

* + - 1. Dalam hal pelaksanaan strategi Penerapan Inpres No.1 tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan kebijakan :
1. Melakukan prosedur penganggaran sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
2. Transparansi dan Akuntabel pada Penganggaran Pemerintah Kota Padang Panjang
3. Singkronisasi Dokumen Perencanaan dengan Penganggaran dalam penyusunan anggaran daerah.
	* + 1. Kebijakan yang digunakan untuk pelaksanaaan stategi Meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Keuangan adalah :

a). Menerbitkan pedoman tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

b). Memanfaatkan Terknologi Informatika dalam pengelolaan keuangan daerah

c). Penyempurnaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dengan kebijakan menerbitkan kebijakan akuntansi pemerintah daerah

* + - 1. Kebijakan untuk pelaksanaan strategi melaksanakan penataan aset dan kekayaaan daerah secara optimal adalah dengan Menginventarisir dan melakukan pengamanan terhadap aset daerah secara berkelanjutan
			2. Untuk Menggali potensi-potensi pendapatan dalam upaya peningkatan PAD seperti yang telah ditetapkan maka akan digunakan kebijakan sebagai berikut :

a). Penegakan peraturan dibidang pendapatan daerah baik pajak maupun retribusi daerah

b). Pemanfaatan Teknologi Informatika dalam Pelaksanaan Tugas Pemungutan Pajak dan Retribusi

Untuk lebih jelasnya keterkaitantujuan,sasaran,strategi dan kebijakan pembangunan pada BPKD Tahun 2019-2023 dapat digambarkanpada tabel berikut :

**Tabel. 5**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang keuangan Daerah | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Meningkatan pengelolaan Penganggaran dan Perbendaharaan daerah | 1. Menerbitkan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang Undangan
2. Transparansi, Akuntabel dan Singronisasi Dokumen Perencanaan dengan Penganggaran dalam penyusunan anggaran Pemerintah Kota Padang Panjang
3. Menerbitkan Sistem dan Prosedur Penatausahaan keuangan daerah
 |
|  |  | Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Keuangan | * + - 1. Memanfaatkan Terknologi Informatika dalam pengelolaan keuangan daerah
			2. Penyempurnaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dengan kebijakan menerbitkan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
 |
|  |  | Meningkatkan dan Mengembangkan Pengelolaan Barang Milik Daerah | * + 1. Menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan barang Milik Daerah
		2. Melaksanakan Pencatatan Aset yang bertambahan dan berkurang
		3. Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi Vertikal terkait dengan pengalihan aset
 |
|  | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD | Menggali potensi-potensi pendapatan dalam upaya peningkatan PAD | a). Penegakan peraturan dibidang pendapatan daerah baik pajak maupun retribusi daerahb). Melaksanakan Even-evan untuk mendorong minat masyarakat untuk membayar pajakc). Mengawasi pemungutan pajak dan retribusi dengan melakukan uji petikd). Pemanfaatan Teknologi Informatika dalam Pelaksanaan Tugas Pemungutan Pajak dan Retribusi |

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

 Berdasarkan Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk periode 2019-2023, meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program dan kegiatan ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis BPKD dengan tetap mengacu pada RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2019-2023. Keterkaitan sasaran, program dan kegiatan pada BPKD dapat dijelaskan pada tabel 5.1 berikut

**Tabel 5.1**

**Keterkaitan Antara Kelompok Sasaran, Program dan Kegiatan BPKD**

**Kota Padang Panjang 2019-2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran | Program | Kegiatan |
| 1 | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Peningkatan Pengelolaan Penganggaran dan Perbendaharaan Daerah | * + - * 1. Penyusunan Ranperda tentang APBD
				2. Penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD
				3. Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah
				4. Penelitian dan Penggandaan DPA
				5. Koordinasi Penyusunan RKA / DPA SKPD dan RKAP / DPPA SKPD
				6. Penyusunan Standar Biaya
				7. Penyusunan Ranperda tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah
				8. Penyusunan KUA PPAS
				9. Penyusunan KUA PPAS Perubahan
				10. Penyusunan Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah
				11. Kajian Investasi Penyertaan Modal Daerah
 |
| 2 | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan daerah | Peningkatan dan Pengembangan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | * + - * 1. Verifikasi data laporan Keuaangan OPD
				2. Rekonsiliasi Keuangan daerah
				3. Penyusunan Kebijakan akuntansi Pemerintah daerah
				4. Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
				5. Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun daerah
				6. Penyusunan ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
 |
| 3 | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan daerah | Peningkatan dan Pengembangan Barang Milik Daerah | Penyusunan pelaporan semesteran dan tahunan Barang Milik DaearahPenghapusan dan penjualan BMDPenyajian Data assetPenyusunan RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMDSensus Aset Barang Milik DaerahPenyusunan Perubahan RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMDPensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah |
| 4 | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD | Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah | * + - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan daerah
			2. Pengelolaan administrasi dan pelayanan PBB-P2 serta BPHTB
			3. Pendataan Objek pajak
			4. Penghapusan data piutang penyerahan PBB-P2
			5. Kajian Potensi PAD Kota Padang Panjang
			6. Pekan pajak daerah
			7. Penghapusan Piutang PBB-P2
			8. Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah
			9. Penyusunan Zona Nilai tanah
 |

Untuk lebih jelasnya program, kegiatan, indikator kinerja, sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada 5.2 berikut ini :

|  |
| --- |
| **Tabel T-C.27** |
| **Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif** |
| **Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2019-2023** |
| **Kota Padang Panjang** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tujuan | Indikator Tujuan / sasaran | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Program dan Kegiatan | Data capaian pada tahun awal perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | Unit Kerja SKPD Penanggung jawab | Keterangan | Lokasi |
| Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD |
| Target  | Rp | Target  | Rp | Target  | Rp | Target  | Rp | Target  | Rp | Target  | Rp |
| **Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel** | **Opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah** |   |   |   |    |   |   | **WTP** |  **11,667,173,600**  | **WTP** |  **12,097,639,720**  | **WTP** |  **10,879,171,064**  | **WTP** |  **11,916,632,869**  | **WTP** |  **12,091,292,123**  | **WTP** |  **58,651,909,376**  |   |   |   |
|   |   |  |  | **01** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran** |   |   | 6,626,619,000 |   | 6,267,411,000 |   | 6,581,506,600 |   | 6,581,506,600 |   | 6,581,506,600 |   | 32,638,549,800 |   |   |   |
|   |   |   |   | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat | 0% | 3 Jenis | 14,750,000 | 3 Jenis | 6,000,000 | 3 Jenis | 6,000,000 | 3 Jenis | 6,000,000 | 3 Jenis | 6,000,000 | 15 Jenis | 38,750,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
|   |   |   | 02 | Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik | Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan | 0% | 60 rekening  | 305,800,000 | 60 rekening  | 366,960,000 | 60 rekening  | 366,960,000 | 60 rekening  | 366,960,000 | 60 rekening  | 366,960,000 | 300 rekening  | 1,773,640,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
|   |   |   | 03 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara | 0% | 8 unit roda 4, 26 unit roda 2 | 463,681,000 | 8 unit roda 4, 26 unit roda 2 | 417,312,900 | 8 unit roda 4, 26 unit roda 2 | 463,681,000 | 8 unit roda 4, 26 unit roda 2 | 463,681,000 | 8 unit roda 4, 26 unit roda 2 | 463,681,000 | 40 unit roda 4, 130 unit roda 2 | 2,272,036,900 | BPKD |   | Padang Panjang |
|   |   |   | 04 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan | 0% | 1 unit | 322,959,000 | 1 unit | 387,550,800 | 1 unit | 387,550,800 | 1 unit | 387,550,800 | 1 unit | 387,550,800 | 5 unit | 1,873,162,200 | BPKD |   | Padang Panjang |
| Jul |   |   | 05 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan | 0% | 25 Jenis | 129,000,000 | 25 Jenis | 116,100,000 | 25 Jenis | 156,000,000 | 25 Jenis | 156,000,000 | 25 Jenis | 156,000,000 | 125 Jenis | 713,100,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
|   |   | 06 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 0% | 2 Jenis | 232,598,000 | 2 Jenis | 209,338,200 | 2 Jenis | 279,117,600 | 2 Jenis | 279,117,600 | 2 Jenis | 279,117,600 | 10 jenis | 1,279,289,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
|   |   |   | 07 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan kantor | 0% | 20 jenis | 7,827,000 | 20 jenis | 7,044,300 | 20 jenis | 9,392,400 | 20 jenis | 9,392,400 | 20 jenis | 9,392,400 | 100 jenis | 43,048,500 | BPKD |   | Padang Panjang |
|   |   |   | 08 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan | 0% | 1.300 ok | 99,000,000 | 1.300 ok | 89,100,000 | 1.300 ok | 118,800,000 | 1.300 ok | 118,800,000 | 1.300 ok | 118,800,000 | 6.500 ok | 544,500,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
|   |   |   | 09 | Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran | Jumlah tenaga administrasi yang dipekerjakan | 0% | 10 orang | 205,954,000 | 10 orang | 359,944,800 | 10 orang | 359,944,800 | 10 orang | 359,944,800 | 10 orang | 359,944,800 | 50 orang | 1,645,733,200 | BPKD |   | Padang Panjang |
|   |   |   | 11 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat-rapat dan konsultasi yang diikuti | 0% | 65 orang/kali | 420,000,000 | 65 orang/kali | 378,000,000 | 65 orang/kali | 504,000,000 | 65 orang/kali | 504,000,000 | 65 orang/kali | 504,000,000 | 325 orang/kali | 2,310,000,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
|   |   |   |   | 15 | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Jumlah premi asuransi barang milik daerah yang diasuransikan | 0% | 4 polis | 2,454,050,000 | 4 polis | 2,944,860,000 | 4 polis | 2,944,860,000 | 4 polis | 2,944,860,000 | 4 polis | 2,944,860,000 | 20 polis | 14,233,490,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
|   |   |   |   | 16 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah pengelola Keuangan daerah | 0% | 75 orang | 1,900,000,000 | 75 orang | 900,000,000 | 75 orang | 900,000,000 | 75 orang | 900,000,000 | 75 orang | 900,000,000 | 375 orang | 5,500,000,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
|   |   |   |   | 17 | Penyediaan sewa tanah | Jumlah tanah yang disewakan untuk kepentingan publik | 0% | 6 kapling | 71,000,000 | 6 kapling | 85,200,000 | 6 kapling | 85,200,000 | 6 kapling | 85,200,000 | 6 kapling | 85,200,000 | 30 kapling | 411,800,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
|   |   |   |   | **02** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur** |  |   |  1,535,250,000  |   |  1,943,680,000  |   |  717,850,000  |   |  1,037,850,000  |   |  757,850,000  |   |  5,992,480,000  |   |   |   |
|   |   |   |   | **05** | Pengadaan Kendaraan dinas / operasional | Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas/operasional | 0% | Kendaraan roda 4 1 unit, roda 2 8 unit |  420,500,000  | Kendaraan roda 2 8 unit, 1 unit ,obil keliling pajak daerah |  454,450,000  | Kendaraan, roda 4 1unit |  254,450,000  | Kendaraan roda 4 1 unit |  254,450,000  | Kendaraan roda 4 1 unit |  254,450,000  | Kendaraan roda 4 4 unit, roda 2 16 unit | 1,638,300,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
|   |      | 02 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah Perllengkapan Gedung Kantor yang diadakan | 0% | 10 unit PC, 25 unit UPS, 10 unit printer, 5 unit laptop, 2 unit printer laser jet, 1 unit mesin FC,, 2 unit speaker, 1 set CCTV, 1 unit lemari kayu |  322,600,000  | 5 unit scanner, 5 unit printer, 1 set meja rapat, 2 unit infocus, 5 unit PC, 50 buah kursi susun, 5 buah meja 1/2 biro, 2 buah rol o pack, 4 set coffeemaker | 350,000,000 | 5 unit penghancur kertas, 5 unit PC, 1 buah kursi kerja pejabat, 60 buah kursi kerja. 5 unit kursi tunggu, 5 unit printer | 250,000,000 | 5 unit PC, 5 unit printer, 2 unit camera, 1 unit mesin porporasi, 1 unit drone | 270,000,000 | 10 unit PC, , 10 unit printer, 5 unit laptop, 2 unit printer laser jet, 5 unit ac | 290,000,000 | 10 unit PC, 25 unit UPS, 10 unit printer, 5 unit laptop, 2 unit printer laser jet, 1 unit mesin FC,, 2 unit speaker, 1 set CCTV, 1 unit lemari kayu | 1,482,600,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
| 06 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | 0% | 1 Unit | 160,000,000 | 1 Unit | 144,000,000 | 1 Unit | 160,000,000 | 1 Unit | 160,000,000 | 1 Unit | 160,000,000 | 5 Unit | 784,000,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
| 07 | Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor | Jumlah alat-alat kantor yang dipelihara | 0% | 12 Unit | 44,500,000 | 12 Unit | 40,050,000 | 12 Unit | 53,400,000 | 12 Unit | 53,400,000 | 12 Unit | 53,400,000 | 60 Unit | 244,750,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
| 09 | Pembangunan Gedung Kantor | Jumlah lift yang terpasang | 0% |  1 buah lift  |  587,650,000  |  1 buah lift  | 705,180,000 | 2 sertifikat | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  1 buah lift  | 1,292,830,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
|   | 10 | Rehab ringan /sedang / berat gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang direhab | 0% |  -  |  -  |  1 Gedung  |  250,000,000  |  -  | 0 |  1 Gedung  | 300,000,000 |  -  | 0 |  1 Gedung  | 550,000,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
|   |   |   |   | **03** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Persentase Kepatuhan ASN terhadap jam kerja** |  |   |  -  |   |  114,000,000  |   |  -  |   |  164,160,000  |   |  -  |   |  278,160,000  |   |   |   |
|   |   |   |   | 02 | Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya | Jumlah stel pakaian dinas dan perlengkapan yang diadakan | 0% | 0% |  -  | 65 stel | 114,000,000 | 0% | 0 | 65 stel | 164,160,000 | 0% | 0 | 325 orang | 278,160,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
|  |  |  |   | 05 | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** |  |   | 100,000,000 |   | 283,600,000 |   | 332,320,000 |   | 378,784,000 |   | 434,540,800 |   | 1,529,244,800 |   |   |   |
|   |   |   |   | 03 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah apartur yang mengikuti bimtek | 0% | 8 orang/kali | 100,000,000 | 8 orang/kali | 90,000,000 | 8 orang/kali | 100,000,000 | 8 orang/kali | 100,000,000 | 8 orang/kali | 100,000,000 | 40 orang/kali | 490,000,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
|   |   |   |   | 04 | Pelatihan dan Pengembangan SDM Aparatur | Jumlah pegawai dilingkungan BPKD yang mengikuti pelatihan | 0% | 0% | 0 | 72 orang/kali | 193,600,000 | 72 orang/kali | 232,320,000 | 72 orang/kali | 278,784,000 | 72 orang/kali | 334,540,800 | 288 orang/kali | 1,039,244,800 | BPKD |   | Padang Panjang |
|  |  |  |  | 06 | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**  | **Persentase Ketersediaan Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah yang akuntabel, Transparan, Tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan** |   |   | 19,996,600 |   | 23,995,920 |   | 28,795,104 |   | 34,554,125 |   | 41,464,950 |   | 148,806,699 |   |   |   |
|   |   |   |   | 01 | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah perencanan dan pelaporan | 0% | 6 Dokumen | 5,000,000 | 6 Dokumen | 6,000,000 | 6 Dokumen | 7,200,000 | 6 Dokumen | 8,640,000 | 6 Dokumen | 10,368,000 | 30 Dokumen | 37,208,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
|   |   |   |   | 02 | Penyusunan laporan capaian kinerja keuangan perangkat daerah | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, laporan keuangan semesteran, laporan prognosis realsiasi anggaran dan laporan akhir tahun | 0% | 5 Dokumen  | 14,996,600 | 5 Dokumen  | 17,995,920 | 5 Dokumen  | 21,595,104 | 5 Dokumen  | 25,914,125 | 5 Dokumen  | 31,096,950 | 30 Dokumen  | 111,598,699 | BPKD |   | Padang Panjang |
|  | **Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah** | **Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah** | **Ketepatan Penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP** | 15 | **Program Peningkatan Pengelolaan Penganggaran dan Perbendaharaan Daerah** | **Penyusunan APBD/APBDP Kota Padang Panjang yang tepat waktu** |   | **Tepat waktu**  |  | **Tepat waktu**  |  | **Tepat waktu**  |  | **Tepat waktu**  |  | **Tepat waktu**  |  | **Tepat waktu**  |  | **BPKD** |  | **Padang Panjang** |
|  |  |  |  |   |  | **Realisasi pencairan anggaran tepat waktu Sesuai RAK** |   | **70%** | **1,129,226,000** | **72%** | **1,229,071,200** | **74%** | **1,438,885,440** | **76%** | **1,697,269,440** | **78%** | **1,973,483,328** | **78%** | **7,467,935,408** |  |  |  |
|     |     |     |     | 02 | 2. Penyusunan Ranperda tentang APBD | Jumlah dokumen Ranperda dan Perda APBD serta Ranperwako dan Perwako APBD TA 2020, Buku Perwako Pergeseran APBD 2019 | 0% | 5 Dokumen | 157,950,000 | 5 Dokumen | 189,540,000 | 5 Dokumen | 227,448,000 | 5 Dokumen | 272,937,600 | 5 Dokumen | 327,525,120 | 25 Dokumen | 1,175,400,720 | BPKD |   | Padang Panjang |
| 03 | 4. Penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD | Jumlah dokumen ranperda dan Perda Perubahan APBD serta Ranperwako dan Perwako Perubahan APBD TA 2019 | 0% | 4 Dokumen | 143,240,000 | 4 Dokumen | 171,888,000 | 4 Dokumen | 206,265,600 | 4 Dokumen | 247,518,720 | 4 Dokumen | 297,022,464 | 20 Dokumen | 1,065,934,784 | BPKD |   | Padang Panjang |
| 05 | 6. Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah pelatihan SIPKD aset dan keuangan serta e-budgeting bagi tim admin dan operator SIPKD OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang | 0% | 2kali pelatihan | 199,996,000 | 2kali pelatihan | 239,995,200 | 2kali pelatihan | 287,994,240 | 2kali pelatihan | 316,200,000 | 2kali pelatihan | 316,200,000 | 10 kali pelatihan | 1,360,385,440 | BPKD |   | Padang Panjang |
|   |   |   |   | 22 | 6.Penelitian dan Penggandaan DPA-SKPD dan DPPA SKPD | Jumlah buku DPA SKPD dan DPPA SKPD Kota Padang Panjang | 0% | 600 buku | 54,505,000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 6000 buku | 54,505,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
|        |      |        |        | 23 | Koordinasi Penyusunan RKA / DPA SKPD dan RKAP / DPPA SKPD | Jumlah buku DPA SKPD dan DPPA SKPD Kota Padang Panjang | 0% | 0% | 0 | 600 buku | 65,406,000 | 600 buku | 78,487,200 | 600 buku | 94,184,640 | 600 buku | 113,021,568 | 2400 buku | 351,099,408 |   |   |   |
| 36 | 7. Penyusunan Standar Biaya | Jumlah buku standar biaya di Kota Padang Panjang | 0% | 70 buku | 4,710,000 | 70 buku | 5,652,000 | 70 buku | 6,782,400 | 70 buku | 8,138,880 | 70 buku | 9,766,656 | 350 buku | 35,049,936 | BPKD |   | Padang Panjang |
| 37 | Penyusunan Ranperda tentang Pokok-pokok keuangan Daerah | Jumlah dokumen ranperda tentang pokok-pokok keuangan daerah | 0% | 1 dokumen | 45,625,000 | 1 dokumen | 54,750,000 | 1 dokumen | 65,700,000 | 1 dokumen | 78,840,000 | 1 dokumen | 94,608,000 | 5 dokumen | 339,523,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
| 38 | Penyusunan KUA-PPAS | Tersedianya Dokumen KUA PPA Tahun 2020 | 0% | 2 dokumen | 270,600,000 | 2 dokumen | 324,720,000 | 2 dokumen | 389,664,000 | 2 dokumen | 467,596,800 | 2 dokumen | 561,116,160 | 10 dokumen | 2,013,696,960 | BPKD |   | Padang Panjang |
| 39 | Penyusunan KUA-PPAS Perubahan | Jumlah dokumen KUA PPAS | 0% | 2 dokumen | 122,600,000 | 2 dokumen | 147,120,000 | 2 dokumen | 176,544,000 | 2 dokumen | 211,852,800 | 2 dokumen | 254,223,360 | 10 dokumen | 912,340,160 | BPKD |   | Padang Panjang |
| 01 | Penyusunan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah | Jumlah buku Sisdur Penatausahaan keuangan Daerah | 0% | 1 dokumen | 30,000,000 | 1 dokumen | 30,000,000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2 dokumen | 60,000,000 | BPKD | Tahun 2019 Kegiatan ini gabung dengan bidang akuntansi | Padang Panjang |
|   |   |   |   | 11 | Kajian Investasi penyertaan modal daerah | Jumlah dokumen kajian yang disusun | 0% | 2 dokumen | 100,000,000 |   | 0 |   | 0 |   | 0 |   | 0 | 2 dokumen | 100,000,000 | BPKD | Tahun 2019 Kegiatan ini gabung dengan bidang akuntansi | Padang Panjang |
|  |  |  |  | 15 | **Program Peningkatan dan Pengembangan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | **Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu** |  | **Tepat waktu**  | **355,314,000** | **Tepat waktu**  | **388,320,000** | **Tepat waktu**  | **495,740,000** | **Tepat waktu**  | **538,620,000** | **Tepat waktu**  | **517,980,000** | **Tepat waktu**  | **2,295,974,000** | **BPKD** |  | Padang Panjang |
|  |  |  |   | 09 | 3. Verifikasi data laporan keuangan SKPD | Jumlah buku informasi dan laporan SKPD yang akurat per triwulan | 0% | 4 dokumen | 49,894,000 | 4 dokumen | 52,500,000 | 4 dokumen | 55,120,000 | 4 dokumen | 57,900,000 | 4 dokumen | 60,800,000 | 20 dokumen | 276,214,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
| 10 | Rekonsiliasi keuangan daerah | Jumlah rekonsiliasi dan jumlah data hasil rekonsiliasi keuangan | 0% | 2 dokumen | 100,000,000 | 2 dokumen | 120,000,000 | 2 dokumen | 144,000,000 | 2 dokumen | 172,800,000 | 2 dokumen | 207,360,000 | 10 dokumen | 744,160,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
| 12 | Penyusunan Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen yang disusun | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 dokumen | 70,000,000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 dokumen | 70,000,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
| 13 | Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen kajian yang disusun | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 dokumen | 70,000,000 | 0% | 0 | 1 dokumen | 70,000,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
| 14 | Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun daerah | Jumlah buku laporan akhir tahun daerah tahun 2018 | 0% | 1 Dokumen | 116,800,000 | 1 Dokumen | 122,700,000 | 1 Dokumen | 128,800,000 | 1 Dokumen | 135,300,000 | 1 Dokumen | 142,000,000 | 5 Dokumen | 645,600,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
|  |   | 15 | 1. Penyusunan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Jumlah dokumen Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | 0% | 2 dokumen | 88,620,000 | 2 dokumen | 93,120,000 | 2 dokumen | 97,820,000 | 2 dokumen | 102,620,000 | 2 dokumen | 107,820,000 | 10 dokumen | 490,000,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
|  |  |  |  | 17 | **Program Peningkatan dan Pengembangan Barang Milik Daerah** | **Pelaporan penyajian data Barang Milik Daerah sesuai aturan** |  | **Tepat waktu**  | **273,568,000** | **Tepat waktu**  | **467,561,600** | **Tepat waktu**  | **249,073,920** | **Tepat waktu**  | **298,888,704** | **Tepat waktu**  | **358,666,445** | **Tepat waktu**  | **1,647,758,669** | **BPKD** |  | Padang Panjang |
|   |   |   |   | 01 | Penyusunan Pelaporan Semester dan Tahunan Barang Milik Daerah | Jumlah buku laporan semesteran dan laporan tahunan aset daerah yang disusun | 0% | 30 buku | 17,040,000 | 30 buku | 20,448,000 | 30 buku | 24,537,600 | 30 buku | 29,445,120 | 30 buku | 35,334,144 | 150 buku | 126,804,864 | BPKD |   | Padang Panjang |
| 02 | 2.Penghapusan dan penjualan BMD | Jumlah Proses Penghapusasn dan Penjualan BMD | 0% | 4 kali | 109,253,000 | 4 kali | 131,103,600 | 4 kali | 157,324,320 | 4 kali | 188,789,184 | 4 kali | 226,547,021 | 20 kali | 813,017,125 | BPKD |   | Padang Panjang |
| 04 | 4.Penyajian data aset | Jumlah buku data aset tetap Pemerintah Kota Padang Panjang | 0% | 30 buku | 11,620,000 | 30 buku | 263,944,000 | 30 buku | 16,732,800 | 30 buku | 20,079,360 | 30 buku | 24,095,232 | 150 buku | 336,471,392 | BPKD |   | Padang Panjang |
|   | 3.Penyusunan RKBMD,RKPBMD,DKBMD dan DKPBMD | Jumlah Buku RKBMD dan RKPBMD Kota Padang Panjang | 0% | 30 buku | 18,465,000 | 60 buku | 42,066,000 | 60 buku | 50,479,200 | 60 buku | 60,575,040 | 60 buku | 72,690,048 | 270 buku | 244,275,288 | BPKD |   | Padang Panjang |
|   |   |   |   |   | Pensertifikatan tanah Pemerintah Daerah | Jumlah sertifikat yang diterbitkan | 0% | - | 0 | 4 Sertfikat | 10,000,000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 4 Sertfikat | 10,000,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
|   |   |   |   | 09 | Sensus aset barang milik daerah | Jumlah buku laporan inventaris / sensus barang milik daerah | 0% | 30 buku | 100,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 buku | 100,600,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
|   |   |   |   | 08 | Penyusunan Perubahan RKBMD,RKPBMD,DKBMD dan DKPBMD | Jumlah buku perubahan RKBMD dan RKPBMD Kota Padang Panjang | 0% | 30 buku | 16,590,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 buku | 16,590,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
|  |  | **Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD** | **Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah** | 17 | **Program Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah** | **Persentase Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah** |   | 5% | 1,627,200,000 | 5% | 1,380,000,000 | 5% | 1,035,000,000 | 5% | 1,185,000,000 | 5% | 1,425,800,000 | 25% | 6,653,000,000 | **BPKD** |  | Padang Panjang |
|   |   |   |   | 01 | 1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah | Jumlah Pencapaian Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah | 0% | 100 M | 980,000,000 | ####### | 500,000,000 | ####### | 450,000,000 | ####### | 500,000,000 | ####### | 500,000,000 | ####### | 2,930,000,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
| 03 | Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah | Tertibnya administrasi pajak dan pengelolaan retribusi | 0% | 0% | 0 | 50 objek pajak dan 11 OPD pengelola retribusi | 30,000,000 | 50 objek pajak dan 11 OPD pengelola retribusi | 35,000,000 | 50 objek pajak dan 11 OPD pengelola retribusi | 40,000,000 | 50 objek pajak dan 11 OPD pengelola retribusi | 45,000,000 | 200 objek pajak dan 11 OPD pengelola retribusi | 150,000,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
| 04 | 3.Pengelolaan administrasi dan pelayanan PBB-P2 Serta BPHTB | Jumlah SPPT PBB-P2 yang didistribusikan | 0% | 1400 lbr | 141,080,000 | 1400 lbr | 150,000,000 | 1400 lbr | 250,000,000 | 1400 lbr | 300,000,000 | 1400 lbr | 350,000,000 | 7000 lbr | 1,191,080,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
| 05 | Kajian Potensi PAD Kota Padang Panjang | Jumlah Kajian Potensi PAD | 0% | 1 Dokumen Kajian | 50,000,000 | 1 Dokumen Kajian | 200,000,000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2 Dokumen Kajian | 250,000,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
| 06 | Pekan Pajak Daerah | Jumlah Ivent yang dilaksanakan | Ivent | 4 Ivent | 200,800,000 | - | 0 |   | 0 |   | 0 | 4 Ivent | 230,800,000 | 10 Kegiatan | 431,600,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
| 07 | Pendataan Objek Pajak | Jumlah kelurahan yang menjadi lokasi Update data objek Pajak PBB-P2 | 0% | 16 kelurahan | 209,400,000 | 16 kelurahan | 250,000,000 | 16 kelurahan | 300,000,000 | 16 kelurahan | 300,000,000 | 16 kelurahan | 300,000,000 | 16 kelurahan | 1,359,400,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
| 08 | Penghapusan Data Piutang Penyerahan PBB-P2  | Jumlah Keputusan Walikota yang dihasilkan  | Keputusan | 1 Perwako | 45,920,000 | - | 0 | - | 0 | 1 perwako | 45,000,000 | - | 0 | 1 perwako | 90,920,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
|   | 10 | Penyusunan Zona nilai tanah | Jumlah Peta zona nilai tanah yang dihasilkan | 1 Dokumen | 0% | 0 | 1 dokumen | 250,000,000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 dokumen | 250,000,000 | BPKD |   | Padang Panjang |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Padang Panjang, Januari 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **INDRA GUSNADY, SE, M.Si** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pembina Tk. I, NIP. 19700804 199803 1 006 |

**BAB VII**

**INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2019 – 2023 program Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang yang menjadi program dalam pencaian Tujuan dan Sasaran RPJMD terlihat pada tabel 6 berikut ini:

TABEL 7

**INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**TAHUN 2019-2023**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **No** | **INDIKATOR** | **KONDISI AWAL PADA PERIODE RPJMD** | **KONDISI KINERJA PADA TAHUN BERJALAN DAN AKHIR PERIODE RPJMD** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **Kondisi Akhir Periode RPJMD** |
| 1 | Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |

Berdasarkan tabel indikator Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD diatas terdapat Program yang akan mencapai target indikator kinerja yaitu : Program Peningkatan dan Pengembangan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

**BAB VII**

**PENUTUP**

* 1. **Kaidah Pelaksanaan**

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan Daerah disamping merupakan implementasi dari penjabaran visi dan misi serta program daerah secara umum juga dimaksudkan sebagai pedoman, arah dan kerangka kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

Pelaksanaan dari RENSTRA Badan Pengelola Keuangan Daerah berkaitan dengan mekanisme dan ketentuan pelaksanaannya melingkupi segenap struktur organisasi dilingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah yang memiliki kewajiban yang sama untuk senantiasa memelihara dan menjamin konsistensi antara kebijakan dan strategi dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

 Secara garis besar organisasi pelaksana dari Rencana Strategis tersebut terdiri dari :

1. Sekretariat serta seluruh bidang dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah;
2. Sekretariat serta Bidang dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah berkewajiban membuat dan merencanakan program serta kegiatan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing unit;
3. Guna terciptanya efektivitas dari pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dilingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah, setiap bidang diharapkan melakukan kontrol untuk mengevaluasi sejauh mana capaian program dan kegiatan dalam lingkup unit masing-masing;
4. Untuk menjamin konsistensi dari pelaksanaan program dan kegiatan secara keseluruhan dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah, maka setiap terjadinya perubahan ataupun penambahan program , perlu dikonsultasikan bersama melalui sekretariat Badan Pengelola Keuangan Daerah melalui bagian keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebelum program tersebut dijabarkan dan dilaksanakan.
	1. **Pengendalian dan evaluasi**

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, strategi, program dan kegiatan dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan, dilaksanakan secara terintegrasi dengan jalan :

* 1. Pada tiap akhir tahun anggaran, seluruh unit baik sekretariat maupun bidang dilingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan bersama yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan, baik kesesuaian dengan rencana alokasi yang telah ditetapkan maupun ksesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur serta peraturan-peraturan lainnya;
	2. Guna menjaga efektifitas pelaksanaan program untuk mewujudkan tujuan bersama, maka setiap bidang wajib melakukan pemantauan serta melakukan tindakan koreksi yang diperlukan serta melaporkan secara berkala setiap bulannya kepada Dinas melalui Sekretariat Badan Pengelola Keuangan Daerah cq. BagianKeuangan, Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan.

Padang Panjang, Januari 2019

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KOTA PADANG PANJANG

INDRA GUSNADY, SE, M.Si

Pembina, NIP. 19700804 199803 1 006



**RENCANA STRATEGIS**

**(renstra)**

**BADAN PENGELOLA KEUANGANDAERAH**

**KOTA PADANG PANJANG**

**2019-2023**

**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

**2019**